



CIPS
Center for Indonesian
Policy Studies



Makalah Kebijakan No. 35

Penanaman Modal Asing di Sektor Pertanian Indonesia

oleh Donny Pasaribu, Arumdriya Murwani, dan Indra Setiawan

www.cips-indonesia.org

Ucapan Terima Kasih:

Proyek ini didanai oleh Pemerintah Australia melalui *Australian Alumni Grant Scheme* dan dikelola oleh Australia Awards di Indonesia.

Penafian:

Pandangan yang disampaikan di dalam laporan ini merupakan milik penulis dan tidak serta merta mewakili Australian Department of Foreign Affairs of Trade, Kedutaan Besar Australia, Australia Awards dan Australia Global Alumni di Indonesia

Makalah Kebijakan No. 35
Penanaman Modal Asing di Sektor Pertanian Indonesia

Penulis:

Donny Pasaribu, Arumdriya Murwani, dan Indra Setiawan

Jakarta, Indonesia

April, 2021

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	6
Kondisi Sektor Pertanian Indonesia.....	8
Masalah-Masalah Investasi di Sektor Pertanian Indonesia.....	17
Ukuran dan Kedalaman Pasar.....	17
Masalah Lahan.....	20
Peraturan dan Kebijakan.....	22
Kebijakan Swasembada Pangan.....	25
Kelemahan Kelembagaan dan Data yang Tidak Akurat.....	27
Perbedaan Budaya dan Menemukan Mitra Usaha Lokal.....	28
Keterampilan dan Tenaga Kerja.....	30
Dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	32
Opsi Kebijakan di Masa yang akan Datang dan Catatan Penutup.....	35
Referensi.....	37
Wawancara.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hasil panen komoditas utama tahun 2019 (ton per hektar).....	8
Gambar 2. Total produksi panen komoditas utama (2019).....	9
Gambar 3. Inflasi IHK (%) beberapa jenis pangan dan inflasi IHK secara keseluruhan (dibandingkan dengan tingkat harga tahun 2007).....	11
Gambar 4. Realisasi PMA di sektor pertanian berdasarkan jenis komoditas.....	13
Gambar 5. Indeks pembatasan investasi di sektor pertanian.....	14
Gambar 6. Aliran PMA Australia ke Indonesia berdasarkan sektor.....	15
Gambar 7. Impor hewan hidup Indonesia, dari Australia dan total impor.....	18
Gambar 8. Impor daging Indonesia, dari Australia dan total impor.....	19
Gambar 9. Intervensi negara oleh Indonesia yang berdampak pada Australia.....	23
Gambar 10. Komposisi tenaga kerja berdasarkan pencapaian edukasi tertinggi di Indonesia.....	31

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menarik lebih banyak perdagangan dan penanaman modal, serta untuk berintegrasi lebih lanjut ke dalam perekonomian global. Negara ini secara aktif telah mengupayakan kerja sama ekonomi, baik melalui perjanjian regional, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan dengan negara-negara lain secara individu, seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Australia (IA-CEPA).

Terlepas dari upaya integrasi ini, pemerintah hanya memberikan perhatian yang relatif kecil untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di sektor pertanian Indonesia. PMA di Indonesia pada sektor ini hanya berjumlah 3-7% dari total realisasi PMA antara tahun 2015 dan 2019. Selain itu, mayoritas PMA di sektor pertanian Indonesia ada di sub-sektor kelapa sawit, yang memang dipandang lebih menguntungkan dibandingkan sub-sektor lainnya. Melalui wawancara dengan investor asal Australia, asosiasi-asosiasi bisnis Australia, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia, makalah ini mengidentifikasi beberapa masalah yang berdampak pada keputusan investor untuk berinvestasi di sektor pertanian Indonesia.

Masalah lahan merupakan isu utama yang dipertimbangkan dalam membuat keputusan berinvestasi di sektor ini. Masalah sewa dan kepemilikan lahan berpotensi menimbulkan konflik agraria yang kemudian dianggap menjadi risiko investasi. Akibatnya, investasi swasta di sektor hulu pertanian masih terbatas. Mengatasi isu lahan membutuhkan reformasi secara meluas yang bisa meningkatkan kejelasan kepemilikan lahan, terutama di wilayah pedesaan di Indonesia.

Memperbaiki ketersediaan infrastruktur, termasuk jalan, pelabuhan, dan listrik di luar Jawa juga masih merupakan hal yang penting. Lahan luas yang dibutuhkan untuk bisnis pertanian berskala besar hanya tersedia di luar Jawa. Maka tanpa infrastruktur yang memadai, investor tidak akan tertarik untuk berinvestasi di sektor pertanian, karena dianggap tidak menguntungkan. Meskipun beberapa investor bersedia untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung usaha mereka, namun margin yang tidak terlalu besar dari hasil panen tanaman pangan tidak bisa menyeimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk infrastruktur.

Perubahan lebih luas pada kebijakan perdagangan pangan juga dibutuhkan, terutama yang terkait dengan hal keterbukaan perdagangan dan peran BUMN dalam mencapai tujuan swasembada. Harga yang harus dibayar untuk mencapai swasembada adalah harga pangan domestik yang lebih tinggi, diversifikasi konsumsi pangan yang minim, dan alokasi sumber daya yang keliru. Dengan mendorong BUMN untuk mencapai tujuan swasembada, pemerintah mendorong realokasi sumber daya dari yang sudah produktif ke proyek-proyek swasembada yang lebih mahal, dan kadang-kadang tidak realistis.

Gangguan harga yang diakibatkan oleh kebijakan swasembada juga memiliki dampak misalokasi. Dampak misalokasi ini mengarahkan sumber daya yang ada ke sub-sektor pertanian yang kurang produktif namun dilindungi, dan juga menjadi penghalang bagi investor yang tidak mau menghadapi risiko politis dengan berinvestasi di sektor pertanian. Perdagangan terbuka tidak hanya akan membuat pangan lebih terjangkau, tetapi juga menghapuskan dampak gangguan harga akibat kebijakan terdahulu di sektor ini. Menghilangkan dampak gangguan-gangguan harga tersebut akan membuat petani dan investor bisa mengalokasikan sumber dayanya seturut

dengan tujuan keuntungan dan produktivitas mereka.

Meningkatkan mekanisme kebijakan sehingga lebih terprediksi juga penting untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim regulasi Indonesia. Ketidakpastian regulasi masih menjadi masalah utama yang menghalangi penanaman modal di Indonesia. Meskipun telah ada upaya deregulasi dengan diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun implementasi peraturan ini tetap bisa berubah untuk merespons tekanan dari masyarakat. Perubahan-perubahan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian iklim regulasi yang dapat mempersulit penanaman modal asing.

Kapasitas kelembagaan juga perlu ditingkatkan agar lebih siap mengakomodasi PMA. Hal ini penting terutama bagi kementerian dan instansi pemerintah yang terlibat dalam perdagangan dan investasi sektor pertanian, serta pemerintah daerah di tingkat lokal. Selain itu, upaya untuk memangkas birokrasi, seperti yang diukur melalui peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berbisnis Bank Dunia (Ease of Doing Business Index), masih sangat penting.

Terakhir, instansi pemerintah yang berwenang dapat fokus pada program yang dapat membina hubungan antara pengusaha Indonesia dan Australia. Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal bisa meningkatkan keterlibatan mereka dengan asosiasi industri dan kemudian mengadakan acara yang bisa menghubungkan mereka dengan pengusaha-pengusaha Australia. Cara lain untuk membina hubungan yang baik adalah dengan menegosiasikan peningkatan kuota visa Bekerja dan Berlibur (Working and Holiday Visa) bagi masyarakat Indonesia untuk bekerja di Australia dan melalui program pertukaran budaya dan bahasa.

Partisipasi dalam perekonomian global selalu menjadi faktor penting dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Sejak sebelum Indonesia modern berdiri, migrasi dan perdagangan internasional telah memfasilitasi penyebaran ide dan budaya dalam proses panjang yang membentuk negara ini hingga seperti sekarang. Hal tersebut merupakan proses evolusi berkelanjutan, meskipun prosesnya bisa berlangsung secara cepat atau lambat.

Akhir-akhir ini, integrasi Indonesia ke dalam perekonomian global telah diperkuat dengan keputusan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan penanaman modal asing sebagai prioritas masa jabatannya yang kedua (2019-2024). Sejak itu, Indonesia secara aktif telah mengupayakan kerja sama ekonomi resmi, baik melalui perjanjian regional, seperti Regional Comprehensive Formal Economic Partnership (RCEP) dan dengan negara-negara lain secara individu, seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Australia (IA-CEPA). Langkah-langkah tersebut menandakan keterbukaan Indonesia terhadap perdagangan dan penanaman modal asing dan kesediaannya untuk berintegrasi lebih lanjut ke dalam perekonomian global.

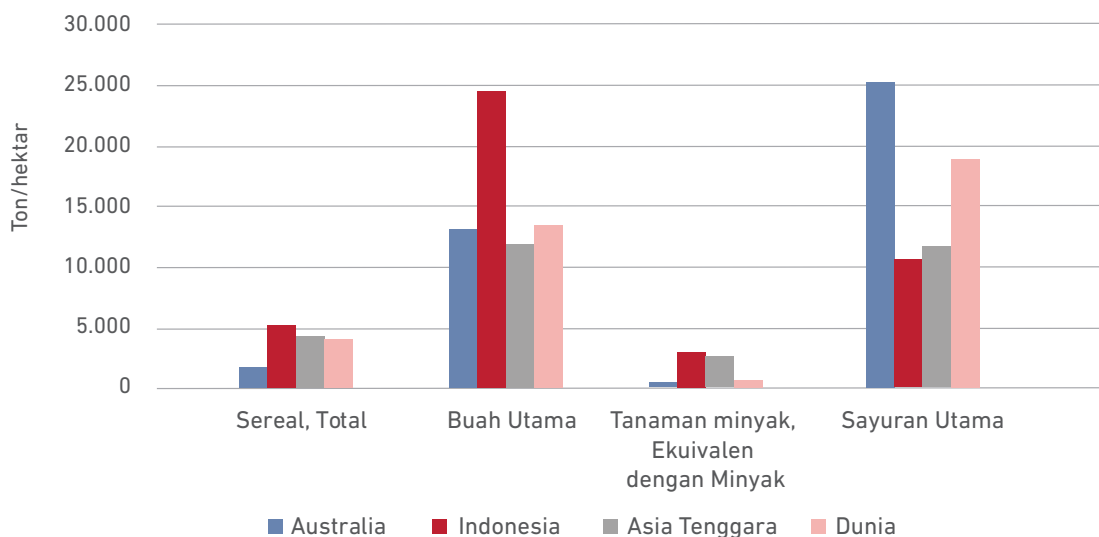
Walaupun banyak upaya yang dicurahkan untuk menarik penanaman modal di sektor infrastruktur, manufaktur, pariwisata, dan ekonomi digital, hanya sedikit upaya yang dilakukan untuk menarik PMA di sektor pertanian Indonesia. Faktor yang mendukung atau menghalangi PMA sektor pertanian bisa berbeda dari yang ada di sektor-sektor lain. Pemahaman mendalam mengenai faktor yang khusus berlaku di sektor pertanian penting bagi pembuat kebijakan, investor, dan pengembangan pemahaman akademik di sektor ini. Pengetahuan ini akan membantu pembuat kebijakan untuk secara efektif mendukung pengembangan perekonomian desa dan pertanian yang berkelanjutan.

KONDISI SEKTOR PERTANIAN INDONESIA

Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung atau menghambat PMA di sektor pertanian Indonesia, dan untuk memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan faktor-faktor tersebut. Indonesia perlu untuk segera memodernisasikan dan memperluas sektor pertaniannya. Seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1, dengan pengecualian produksi sayuran, hasil panen sektor pertanian Indonesia per hektar cukup tinggi jika dibandingkan dengan standar global.¹ Namun demikian, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2, ketika dihitung per kapita, produksi pertanian Indonesia berdasarkan standar global tergolong rendah.

Menurut Database Statistik Korporasi FAO (FAOSTAT), penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia adalah sebesar 13,6%, sementara di Australia hanya 1,5%. Data penyerapan tenaga kerja ini tidak disajikan berdasarkan komoditas, sehingga produksi komoditas per pekerja tidak bisa dibandingkan antara satu negara dengan yang lain. Namun demikian, jika total produksi dibandingkan dengan populasi, total produk per kapita Indonesia di sektor sereal, buah, dan sayuran lebih rendah daripada rata-rata dunia (Gambar 2). Meskipun angka ini tidak dihitung berdasarkan produktivitas per pekerja, namun angka ini tetap dengan kuat menunjukkan produktivitas tenaga kerja pertanian yang rendah.

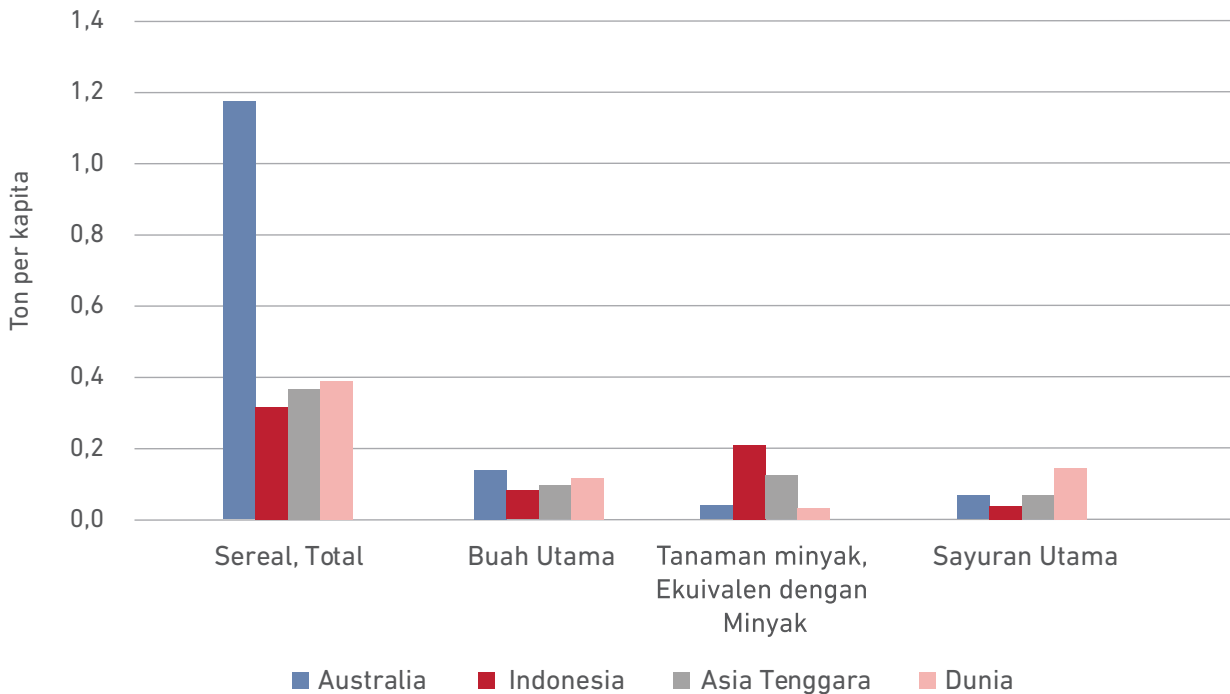
Gambar 1.
Hasil panen komoditas utama tahun 2019 (ton per hektar)



Sumber: FAOSTAT (FAO, 2021)

¹ Untuk penyederhanaan, angka hasil panen diagregatkan menjadi kelompok komoditas pertanian (sereal, buah, minyak, dan sayuran). Mengingat komoditas ini tidak seragam (misalnya buah bervariasi dalam hal bentuk dan berat), maka angka-angka ini harus diinterpretasikan dengan hati-hati.

Gambar 2.
Total produksi panen komoditas utama (2019)



Sumber: FAOSTAT (FAO, 2021)

Ada niat politis yang kuat untuk mencapai swasembada pangan, tetapi bahkan dengan tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor ini, Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhannya. Sepertiga anak-anak di bawah usia lima tahun (balita) di Indonesia terdampak masalah kekerdilan, atau stunting. Dalam Indeks Keamanan Pangan Global atau *Global Food Security Index* yang dikembangkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia menempati peringkat 62 dari 113 negara (EIU, 2019). Sementara itu, peringkat Indonesia untuk keterjangkauan pangan adalah 58, dan untuk kualitas dan keamanan pangan adalah 84. Angka-angka tersebut menggambarkan tantangan serius yang dihadapi konsumen Indonesia, terutama oleh keluarga prasejahtera, yang mengeluarkan hingga 70% dari pendapatan mereka untuk makanan. Menurut proyeksi PBB, populasi Indonesia akan bertambah 33 juta orang pada tahun 2035 (PBB, 2019), sehingga membuat kemampuan untuk memasok pangan berkualitas yang layak dengan harga terjangkau menjadi semakin mendesak.

Perbandingan harga jenis bahan pangan pokok seperti ayam, bawang merah, dan bawang putih di Indonesia dengan harga di negara-negara tetangga juga menunjukkan tantangan yang Indonesia hadapi terkait masalah keterjangkauan pangan. Menurut *Indeks Bu RT*, indeks perbandingan harga pangan yang dikompilasi oleh Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), harga domestik rata-rata untuk ayam, bawang merah, dan bawang putih pada November 2020 adalah 34%, 138%, dan 68% lebih tinggi daripada di Malaysia (CIPS, 2020). Keterjangkauan pangan bukan masalah baru. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pangan Indonesia antara Januari 2010 dan Desember 2019 sangat mencengangkan, yaitu sebesar 258%. Perbandingan angka tersebut dengan inflasi pangan di Malaysia (38%) dan

Singapura (24%) dalam periode yang sama² menunjukkan betapa parah dan sudah lamanya masalah keterjangkauan pangan di Indonesia telah berlangsung. Meskipun komposisi keranjang konsumen antara negara-negara ini bisa berbeda³, adanya kontras perubahan harga pangan antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dalam periode yang sama mengindikasikan kesejahteraan konsumen pangan di Indonesia memburuk secara relatif dibandingkan dengan konsumen di Malaysia dan Singapura. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, karena keluarga berpenghasilan rendah menggunakan pendapatan mereka dalam porsi yang lebih besar untuk makanan dibandingkan keluarga berpenghasilan lebih tinggi, beban harga pangan yang lebih mahal lebih terasa di kalangan keluarga prasejahtera.

Kotak 1. Kebijakan swasembada pangan

Ide politis swasembada pangan di Indonesia merupakan alasan utama adanya aturan pembatasan bagi pengusaha pertanian Australia untuk masuk ke pasar Indonesia. Ide swasembada memiliki sejarah panjang yang berawal dari kebijakan ekonomi nasionalis, quasi-sosialis, pada era Sukarno yang mencakup pemberlakuan hambatan perdagangan yang tinggi pada segala bentuk perdagangan yang sah (Fane & Warr, 2008). Kebijakan swasembada pangan bertujuan untuk mendorong produksi pangan domestik (Hamilton-Hart, 2019) dengan penekanan pada kuantitas produksi domestik, alih-alih kualitas, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Di bawah pemerintahan Orde Baru Soeharto, Indonesia mendorong swasembada beras dengan mensubsidi input dan memperluas fasilitas irigasi menggunakan keuntungan dari ekspor minyak. Kemudian, impor beras dikurangi secara bertahap dan diberhentikan seluruhnya pada 1985. Impor pangan dibebaskan sebentar setelah Krisis Keuangan Asia pada tahun 1997-1998, karena IMF menjadikan liberalisasi perdagangan sebagai prasyarat paket pinjamannya. Namun demikian, proteksionisme kembali dengan cepat setelah demokratisasi, awalnya dalam bentuk tarif (tarif 20% untuk beras impor pada tahun 1999), kemudian dalam bentuk hambatan non-tarif. Ide swasembada pangan mencapai puncaknya dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang bertujuan untuk mencapai swasembada pangan dan kedaulatan dalam pengelolaan sistem pangan.

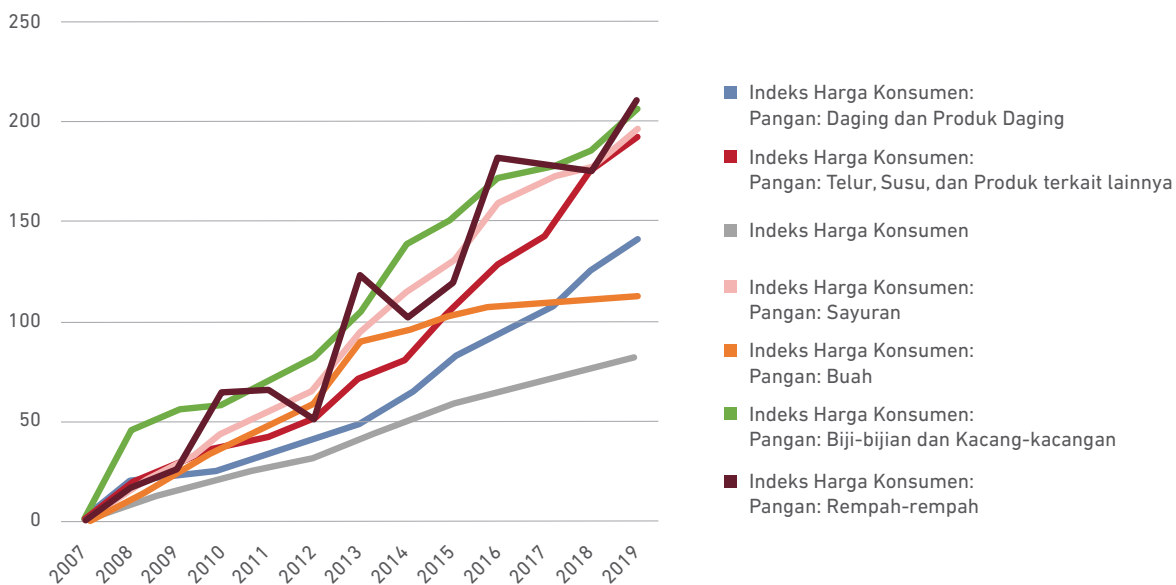
Meskipun Indonesia yang bertujuan mencapai swasembada berfokus pada kuantitas produksi, banyak pengusaha pertanian Australia memprioritaskan kualitas daripada kuantitas karena tingginya biaya produksi di Australia. Perbedaan yang mendasar tersebut dalam obyektif politis Indonesia dan investor potensial Australia di sektor pertanian bisa menjadi sumber ketidakcocokkan kerja sama.

² Kalkulasi penulis berdasarkan kumpulan data CEIC

³ Keranjang konsumen ditentukan oleh konsumsi domestik dan bervariasi di antara negara-negara tersebut. Angka-angka tersebut direvisi secara rutin oleh kantor statistik setiap negara. Perbedaan tersebut bisa menyebabkan implikasi ketika membandingkan nilai inflasi antar negara-negara.

Harga pangan juga telah meningkat jauh lebih tinggi daripada harga barang-barang lain di Indonesia. Gambar 3 menunjukkan perubahan indeks harga beberapa komoditas pangan yang dibandingkan dengan indeks harga konsumen (IHK) secara keseluruhan. Sementara IHK meningkat sebanyak 83% dari 2007 hingga 2019, harga kebanyakan komoditas pangan telah naik lebih dari dua kali lipat. Kenaikan terbesar adalah untuk harga rempah-rempah, biji-bijian dan kacang-kacangan, sayuran, dan telur, susu, dan produk terkait lainnya, yang meningkat hingga tiga kali lipat pada periode yang sama.

Gambar 3.
Inflasi IHK (%) beberapa jenis pangan dan inflasi IHK secara keseluruhan
(dibandingkan dengan tingkat harga tahun 2007)



Catatan: Angka-angka tersebut menunjukkan perubahan harga kumulatif dari tingkat harga di tahun 2007.
Sumber: Kalkulasi penulis berdasarkan data BPS dari kumpulan data CEIC.

Kualitas dan keamanan pangan juga merupakan sebuah hal yang dikhawatirkan di Indonesia. Meskipun kualitas pangan tidak mudah untuk diukur, indikator konsumsi pangan bisa digunakan sebagai gantinya. Menurut Indeks Keamanan Pangan Global (EIU, 2019), Indonesia menduduki peringkat 102 dalam hal diversifikasi konsumsi pangan, peringkat 103 dalam hal ketersediaan mikronutrien, dan peringkat 97 dalam hal kualitas protein. Peringkat-peringkat yang rendah tersebut menegaskan bahwa kelompok masyarakat prasejahtera Indonesia kekurangan akses ke pangan berkualitas yang terjangkau.

Impor pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia akan pangan berkualitas dan untuk menurunkan harga kembali ke tingkat yang terjangkau. Akan tetapi, mengimpor makanan merupakan hal

Menurut Indeks Keamanan Pangan Global (EIU, 2019), Indonesia menduduki peringkat 102 dalam hal diversifikasi konsumsi pangan, peringkat 103 dalam hal ketersediaan mikronutrien, dan peringkat 97 dalam hal kualitas protein.

yang rumit dalam sebuah iklim politis yang menginginkan swasembada pangan. Impor dibatasi melalui hambatan tarif dan non-tarif yang bertujuan untuk mendorong harga domestik dan membatasi pasok domestik.

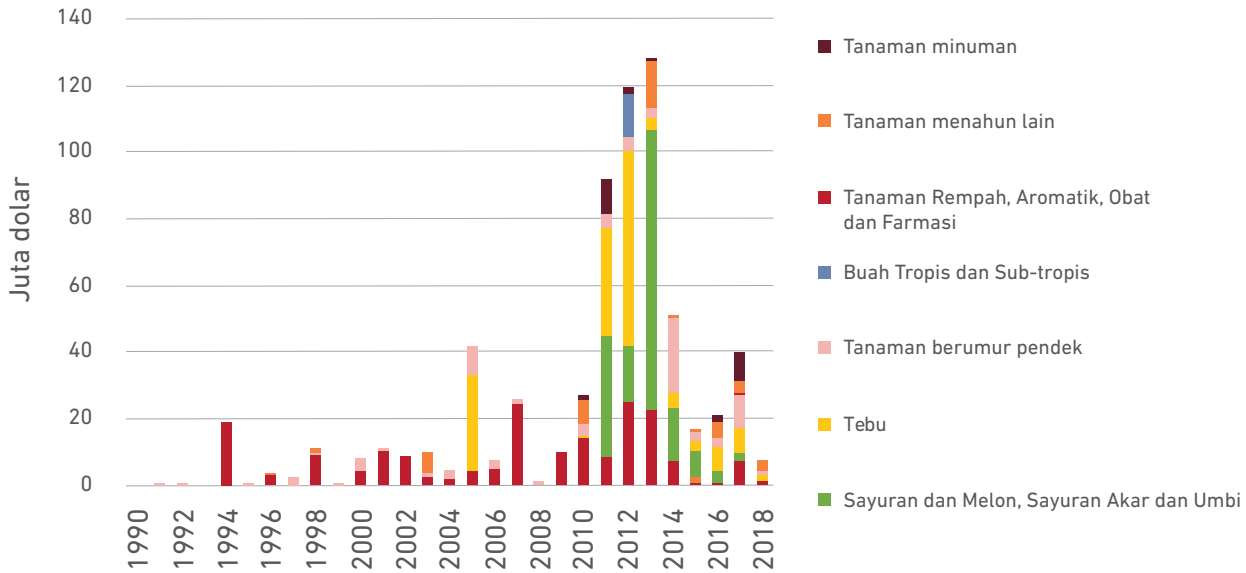
Banyak penelitian telah menelaah dampak hambatan perdagangan terhadap harga pangan, terutama beras (Basri & Patunru, 2012; Marks & Rahardja, 2012). Setelah periode singkat ketika pasar beras dibuka sebagai akibat dari paket reformasi struktural IMF pada 1998, tekanan proteksionis kembali, dalam bentuk hambatan tarif dan non-tarif (Basri & Patunru, 2012). Tekanan proteksionis terkuat ada di impor pangan, termasuk untuk beras, daging sapi, kacang kedelai, garam meja, dan komoditas lainnya yang sensitif secara politis. Karena harga pangan naik melebihi harga di negara-negara tetangga dengan kebijakan perdagangan yang relatif lebih terbuka, hambatan impor pangan yang bertujuan untuk melindungi petani dan membantu sektor pertanian justru berakhir merugikan warga kalangan prasejahtera. Selain itu, kebijakan-kebijakan ini belum berhasil mencapai targetnya untuk mendorong produksi domestik yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“PMA bisa membawa serta teknologi, kapasitas manajerial, dan pengetahuan serta koneksi ke pasar global (Ramstetter, 1999), dan bisa meningkatkan produktivitas perusahaan-perusahaan penerimanya.”

Mengingat adanya keinginan politis untuk meningkatkan produksi domestik, PMA sebaiknya dipertimbangkan sebagai cara lain di mana keterbukaan perekonomian bisa meningkatkan keterjangkauan dan kualitas pangan. PMA bisa membawa serta teknologi, kapasitas manajerial, dan pengetahuan serta koneksi ke pasar global (Ramstetter, 1999), dan bisa meningkatkan produktivitas perusahaan-perusahaan penerimanya. Penelitian di Indonesia telah menunjukkan bahwa PMA memiliki efek limpahan produktivitas yang positif bagi sektor-sektor terkait yang menerima keuntungan dari PMA dan juga efek limpahan upah yang positif di area geografis di mana perusahaan penerima berada (Lipsey & Sjöholm, 2005, 2011). Meskipun temuan ini kebanyakan berdasarkan penelitian sektor manufaktur, dampak serupa juga bisa diharapkan untuk terjadi di sektor pertanian. PMA bisa membantu mengembangkan sektor pertanian Indonesia dan meningkatkan akses ke pangan berkualitas tinggi bagi masyarakat Indonesia.

Namun demikian, hanya ada sedikit PMA di sektor pertanian Indonesia, terutama di sub-sektor pangan dan hortikultura. PMA sektor pertanian hanya 3%-7% dari total realisasi PMA antara 2015 dan 2019 (BKPM, 2020). Terlebih lagi, sejak 2003 PMA di sektor pertanian Indonesia telah terkonsentrasi di sektor kelapa sawit, akibat lonjakan permintaan komoditas sawit di tingkat global. Antara tahun 2003 dan 2018, PMA di sektor kelapa sawit mencapai US\$ 13,9 triliun, sementara itu PMA di komoditas pangan, hortikultura, dan sektor perkebunan lainnya berjumlah hanya US\$ 441 juta. Pada puncaknya di tahun 2014, realisasi PMA kelapa sawit sendiri lebih dari empat kali lipat PMA di seluruh sektor pertanian. Gambar 4 menunjukkan komposisi realisasi PMA komoditas pangan, hortikultura, dan perkebunan, tidak termasuk kelapa sawit. Komoditas pangan termasuk beras, jagung, kacang kedelai, kacang, kacang-kacangan hijau, singkong, dan ubi. Hortikultura termasuk sayuran, buah, rempah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman perkebunan termasuk karet, kelapa, minyak sawit, minuman (kopi, teh, kakao, hop, dan yerba mate), tembakau, kapuk, kina, dan tanaman musiman berumur pendek (tebu, tembakau).

Gambar 4.
Realisasi PMA di sektor pertanian berdasarkan jenis tanaman, tidak termasuk minyak sawit

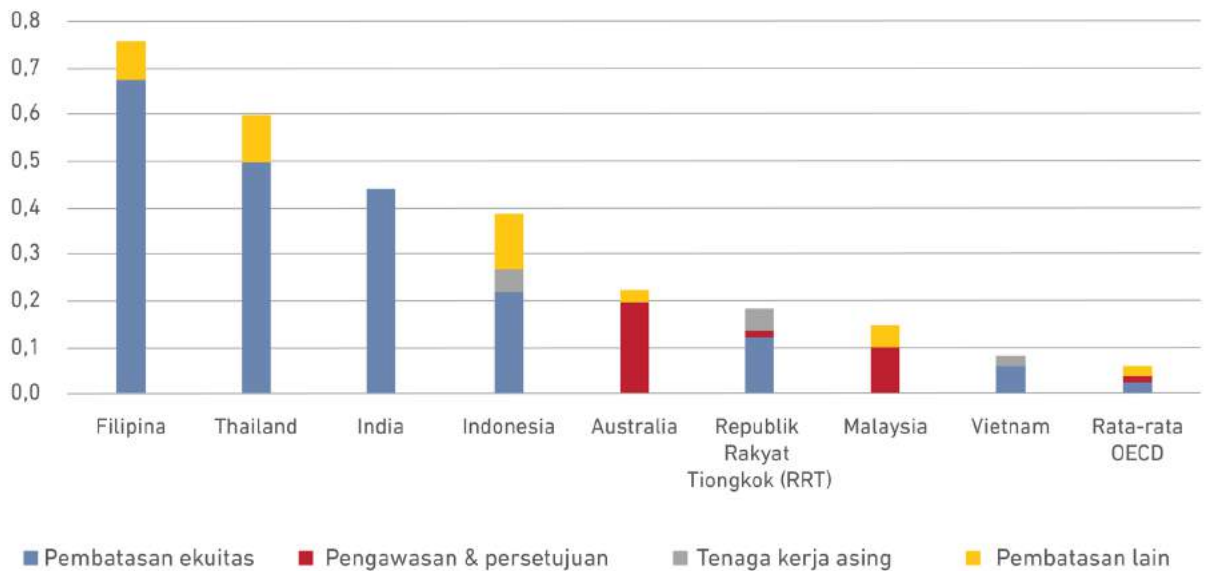


Sumber: Kumpulan data CEIC (2020) berdasarkan BKPM (2020)

Secara historis, dibandingkan dengan negara tetangganya, Indonesia tidak terlalu ramah dalam menyambut penanaman modal asing, terutama di sektor pertanian. Gambar 5 menunjukkan skor indeks pembatasan investasi untuk sektor pertanian di Indonesia dan negara-negara lain di wilayah sekitar yang dibuat oleh OECD. Nol menunjukkan keterbukaan penuh terhadap investasi asing dan satu menandakan iklim investasi asing yang sepenuhnya tertutup. Pada tahun 2019, Indonesia lebih tertutup terhadap investasi asing dibandingkan Australia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Malaysia, dan Vietnam. Hambatan-hambatan tersebut utamanya berupa hambatan ekuitas (sebuah proporsi maksimum kepemilikan asing dalam sebuah usaha), tenaga kerja asing, dan hambatan-hambatan lainnya.

Penanaman modal di sektor pertanian paling dibatasi di sektor hortikultura, yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi. Peraturan-peraturan ini menempatkan hortikultura pada daftar negatif investasi, sebuah daftar sektor yang tertutup atau dibatasi untuk investasi asing, yang hingga tahun 2020 hanya mengizinkan 30% kepemilikan asing untuk sektor hortikultura dan secara tegas membatasi jumlah tenaga kerja asing yang diizinkan dalam sebuah perusahaan milik asing. Kondisi tersebut berubah dengan implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, yang menghapuskan batas kepemilikan asing pada sektor ini.

Gambar 5.
Indeks pembatasan investasi di sektor pertanian



Sumber: OECD (2020)

Walaupun pemimpin negara menunjukkan keterbukaan terhadap penanaman modal asing, kesulitan untuk berinvestasi tetap ada. Penting bagi pembuat kebijakan untuk memahami bagaimana investor membuat keputusan tentang di mana akan berinvestasi dan mengapa PMA di sektor tanaman pangan sangat jarang. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan investor-investor Australia dan yang akan menjadi investor di sektor pertanian.

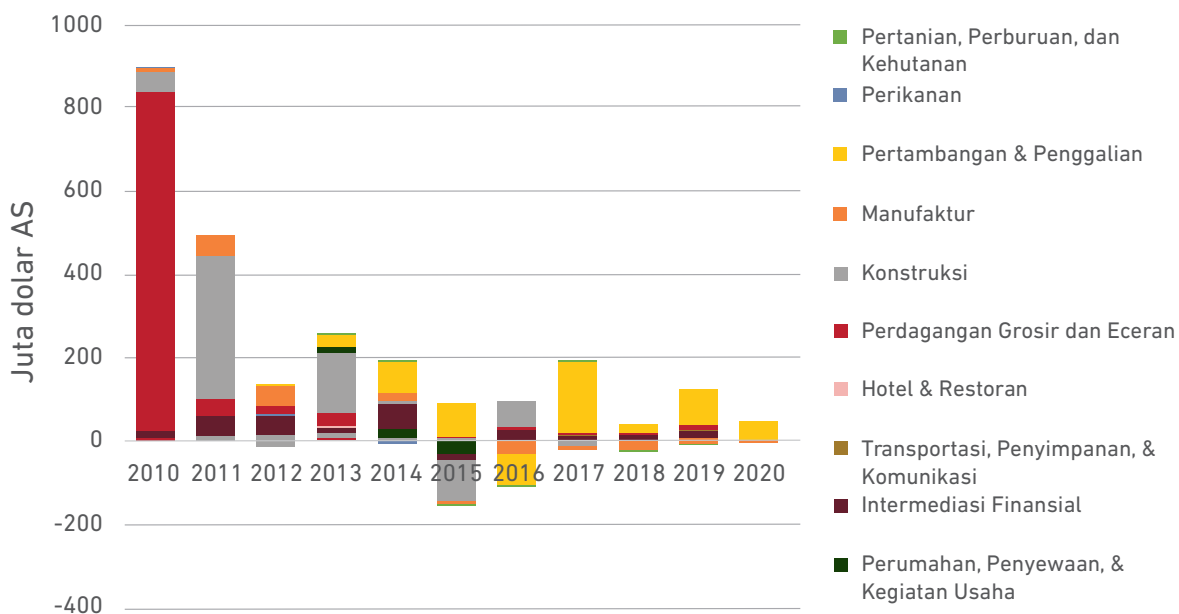
Investor Australia dipilih karena Indonesia dan Australia adalah negara tetangga dengan sejarah kerja sama yang panjang. Meskipun keduanya tidak berada di posisi lima teratas (dan hanya sesekali masuk dalam sepuluh teratas) untuk mitra perdagangan barang satu sama lain, hubungan perdagangan antar kedua negara ini tergolong konsisten. Dalam perdagangan jasa, pariwisata, dan pendidikan telah menjadi sektor yang semakin penting dalam menghubungkan kedua negara ini. Dengan perjanjian kemitraan komprehensif (IA-CEPA) yang ditandatangani pada tahun 2020 lalu, integrasi ekonomi lebih lanjut dan hubungan ekonomi yang lebih dekat diharapkan akan terjadi. Menurut data UN Comtrade (2020), 32% impor Indonesia dari Australia pada 2019 adalah pangan dan hewan ternak, sementara 66% ekspor Indonesia ke Australia adalah barang manufaktur. Kondisi tersebut menunjukkan hubungan dagang di mana masing-masing negara mendapatkan keuntungan dari keunggulan komparatif masing-masing.

Reputasi Australia sebagai eksportir produk pangan berkualitas tinggi sudah dikenal luas. Menurut Indeks Keunggulan Komparatif atau Revealed Comparative Advantage (RCA) UNCTAD (2019), sektor pertanian Australia memiliki keunggulan komparatif di ekspor pangan dan hewan ternak, terutama untuk komoditas jelai, gandum, daging, hewan ternak, dan ekspor buah serta kacang-kacangan. Sektor pertanian Indonesia memiliki keunggulan komparatif untuk ekspor minyak sayur dan produk turunannya (kebanyakan minyak sawit), rempah-rempah, boga bahari,

kakao, kopi, dan teh. Di saat yang sama, sektor pertanian Australia memiliki akses yang lebih baik ke teknologi dan modal usaha yang tidak dimiliki sektor pertanian Indonesia. Perbedaan tersebut berarti bahwa kedua negara memiliki peluang hubungan dagang yang saling melengkapi dan bisa diperkuat dengan hubungan perdagangan dan investasi. Dengan keunggulan teknis dan modal di sektor pertanian, PMA Australia di pertanian Indonesia bisa menjadi bagian solusi untuk meningkatkan produktivitas dan membantu Indonesia menghasilkan pangan berkualitas tinggi yang terjangkau.

Akan tetapi, PMA Australia di Indonesia relatif kecil. Total aliran PMA tahunan rata-rata ke Indonesia antara tahun 2010 dan 2019 adalah US\$ 17,8 miliar, sementara PMA tahunan dari Australia hanya mewakili rata-rata US\$ 217 juta (BI, 2020). Australia adalah penerima net PMA (Productivity Commission, 2020) oleh karena itu rendahnya modal keluar bukan hal yang mengherankan. Tetapi tidak seperti Malaysia, Singapura, dan RRT, Indonesia bukan tujuan PMA sepuluh teratas Australia. Selain itu, investasi Australia di luar negeri cenderung di sektor non-pertanian seperti manufaktur, pertambangan dan penggalian, kegiatan perbankan dan asuransi, serta perumahan. Beberapa PMA Australia telah masuk Indonesia melalui negara ketiga, seperti Singapura, untuk alasan finansial. Hal ini dapat mengakibatkan nilai PMA Australia di Indonesia yang dicatat oleh Bank Indonesia atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terlihat lebih kecil daripada kondisi sebenarnya.

Gambar 6.
Aliran PMA Australia ke Indonesia berdasarkan sektor



Sumber: Kumpulan data CEIC (2020), berdasarkan Bank Indonesia (2020)

PMA terbaru Australia di Indonesia terkonsentrasi di perdagangan grosir dan eceran, konstruksi, pertambangan dan penggalian, serta intermediasi keuangan (Gambar 6). Antara tahun 2010 dan 2020, Bank Indonesia mencatat US\$ 11,6 juta PMA Australia di sektor pertanian Indonesia dan penanaman modal keluar Indonesia di sektor pertanian Australia mencapai total US\$ 8,38 juta. Hubungan investasi dua arah ini mengindikasikan bahwa ada peluang bagi kedua belah pihak, namun makalah ini hanya akan fokus pada aliran PMA Australia yang masuk ke Indonesia.

Dihadapkan dengan inflasi harga pangan yang tinggi, kualitas pangan yang rendah, dan populasi yang bertumbuh, sektor pertanian Indonesia sangat membutuhkan aliran dana PMA. Ada masalah-masalah yang dihadapi investor berpotensi, terutama di sektor pertanian Indonesia, yang membatasi kemampuan investor untuk mengambil keuntungan dari potensi peluang yang ada. Jika mereka tidak diidentifikasi dan ditangani, kebijakan lain yang bertujuan untuk membuka Indonesia agar menerima PMA tidak akan berhasil.

Meskipun beberapa isu umum yang mengganggu investasi—seperti kurangnya infrastruktur—juga harus diatasi, ada juga faktor lain yang hanya ada di sektor pertanian.⁴ Penelitian ini mengumpulkan informasi tentang tantangan berinvestasi di sektor pertanian Indonesia dari sudut pandang Australia melalui wawancara dengan investor berpengalaman, perwakilan badan industri, investor berpotensi, dan staf promosi investasi Indonesia di Australia. Bagian berikutnya akan membahas mengenai hal tersebut.

⁴ Agregasi berdasarkan data kuartal, bukan angka investasi individu.

MASALAH-MASALAH INVESTASI DI SEKTOR PERTANIAN INDONESIA

Meskipun ada upaya untuk mendorong investasi di Indonesia, namun beberapa batasan investasi tetap diberlakukan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mencoba untuk meningkatkan Indeks Kemudahan Berbisnis atau skor indeks Ease of Doing Business (EoDB) guna menarik investasi. Pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 73 dari 190 negara dalam indeks EoDB seperti yang disebutkan dalam hasil survey grup Bank Dunia (Grup Bank Dunia, 2020). Target Presiden Joko Widodo adalah untuk meningkatkan peringkat Indonesia ke peringkat 50 dalam indeks tersebut (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2020). Sejak target itu dibuat, Indonesia telah mengimplementasi beberapa deregulasi kebijakan dan mengesahkan RUU Omnibus tentang Cipta Kerja menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020. Namun, terlepas dari reformasi tersebut, hambatan investasi tetap ada, terutama di sektor pertanian.

Keputusan investasi melibatkan faktor yang luas, dan beberapa faktor lebih penting dari yang lain untuk sektor pertanian. Bagian ini akan membahas faktor yang memengaruhi sektor pertanian Indonesia secara khusus dan bagaimana setiap faktor tersebut berdampak pada keputusan investor Australia untuk berinvestasi di sektor pertanian Indonesia.

Ukuran dan Kedalaman Pasar

Tidak ada yang menyangkal potensi ukuran pasar Indonesia yang tengah berkembang. Indonesia merupakan negara berpenduduk tertinggi keempat di dunia, satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang ada dalam G20, dan ekonomi terbesar ke-10 di dunia dalam hal keseimbangan daya beli (Bank Dunia, 2020). Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang konsisten sejak krisis keuangan Asia tahun 1998. Sebelum pandemi Covid-19, Indonesia mencatat pertumbuhan PDB tahunan sebesar 5,6% dan kemudian diklasifikasi ulang sebagai negara dengan penghasilan menengah ke atas oleh Bank Dunia (2020). Terlepas dari kontraksi ekonomi selama pandemi tahun 2020, perekonomian Indonesia diproyeksikan bertumbuh sebesar 5,3% pada 2021 setelah fase pemulihan dari Covid-19 (ADB, 2020).

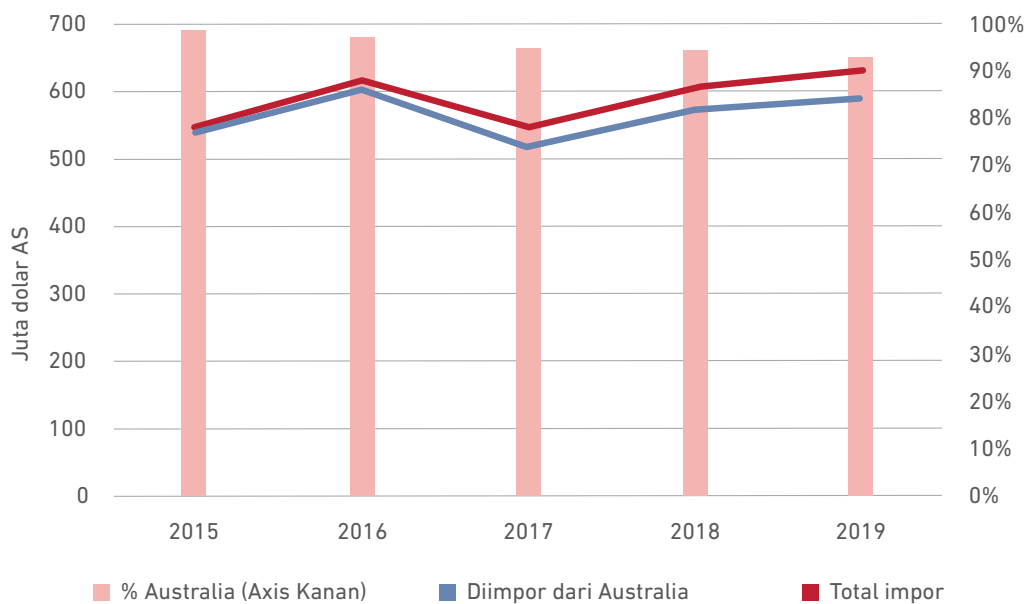
Pertumbuhan ekonomi Indonesia bersamaan dengan tingginya pertumbuhan kelas menengah. Sekitar 52 juta warga negara Indonesia dianggap aman secara ekonomi dan masuk dalam kategori kelas menengah. Ketika penghasilan bertambah, tingkat kemiskinan Indonesia turun hingga ke angka tunggal. Ekspansi besar kelas menengah ini dan berkurangnya kemiskinan telah memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, di mana konsumsi kelas menengah bertumbuh sebesar 12% setiap tahunnya sejak 2002 (Bank Dunia, 2019). Populasi kelas menengah yang besar berarti konsumsi domestik yang lebih tinggi, sehingga memberikan peluang bagi pengusaha Australia untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini sangat tepat karena permintaan produk dari Australia, seperti daging sapi dan produk susu, telah meningkat secara signifikan.

"...sementara semua orang memfokuskan energinya ke RRT, kami merasa peluang dengan negara seperti Indonesia sangat terbuka, dengan basis populasi yang sangat besar, sangat serupa dan

seperti cerita yang sudah sering muncul tentang pertumbuhan kelas menengah dan bertumbuhnya minat akan makanan Barat, produk Barat, dan seterusnya, bagi kami untuk sungguh-sungguh mengambil pendekatan yang berbeda dari yang sudah dilakukan oleh pihak lain yang berfokus pada RRT dan mengabaikan banyak pasar-pasar lainnya ...” – Garry Embleton, Direktur Utama Ausfine

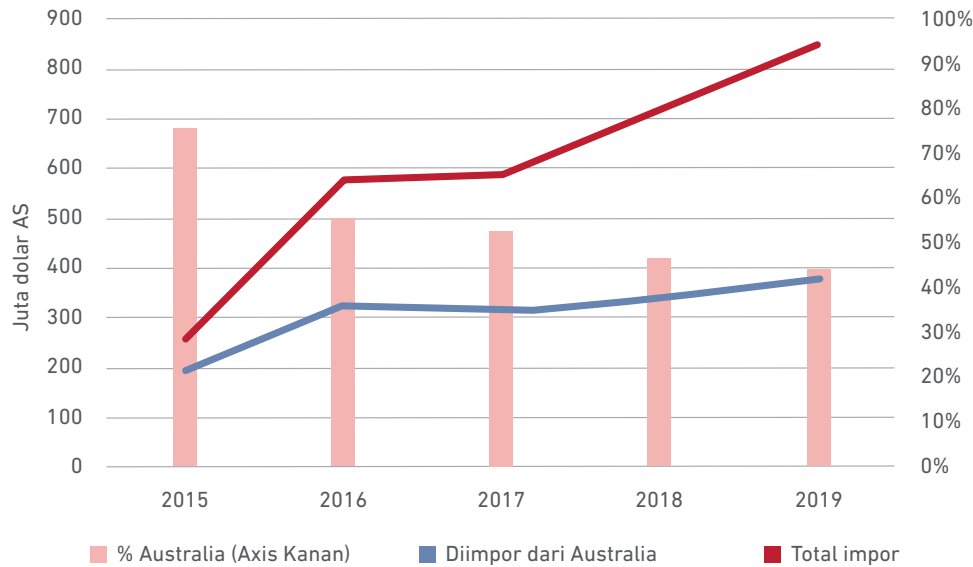
Meningkatnya permintaan daging sapi dan produk susu bisa dilihat dari meningkatnya volume impor kedua produk tersebut. Badan Pusat Statistik (2020) mencatat impor daging sapi bertumbuh pesat dari 50.689,7 ton pada 2015 menjadi 262.251,3 ton pada 2019. Mayoritas daging dan hewan ternak Indonesia diimpor dari Australia. Gambar 7 dan 8 menunjukkan nilai impor hewan ternak dan daging Indonesia. Meskipun nilai impor dari Australia bertumbuh, bagian mereka dari total daging dan hewan ternak yang diimpor menurun. Selain itu, volume produk susu impor juga bertumbuh selaras dengan konsumsinya. Konsumsi produk susu di Indonesia bertumbuh 4% per tahun (Kementerian Pertanian, 2018). Data dari Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa impor produk susu secara konsisten bertumbuh sejak tahun 2010.

Gambar 7.
Impor hewan ternak Indonesia, dari Australia dan total impor



Sumber: UN Comtrade (2020)

Gambar 8.
Impor daging Indonesia, dari Australia dan total impor



Sumber: UN Comtrade (2020)

Namun demikian, beberapa pengusaha Australia percaya bahwa penghasilan keluarga Indonesia masih terlalu rendah untuk menciptakan permintaan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, misalnya produk yang lebih mahal seperti buah tropis premium Australia. Bank Dunia (2019) melaporkan bahwa mayoritas kelas menengah Indonesia, meskipun secara ekonomi tergolong aman, belum termasuk sejahtera. Konsumsi keluarga kelas menengah masih cenderung rendah. Sekitar 90% (47 juta orang) kelas menengah mengeluarkan antara US\$ 7,70 hingga US\$ 20 per hari, sementara sebagian kecil kelas menengah (5 juta orang) mengeluarkan dari US\$20 hingga US\$ 38 setiap harinya (Bank Dunia, 2019). Kelas atas, didefinisikan sebagai warga yang mengeluarkan lebih dari US\$ 38 per hari, mewakili kurang dari 1% populasi Indonesia (Bank Dunia, 2019).⁵

Namun demikian, beberapa pengusaha Australia percaya bahwa penghasilan keluarga Indonesia masih terlalu rendah untuk menciptakan permintaan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, misalnya produk yang lebih mahal seperti buah tropis premium Australia.

⁵ Angka ini berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Bank Dunia percaya bahwa survey tersebut tidak melibatkan banyak orang kaya Indonesia dan kalangan kelas atas sebetulnya lebih banyak dan lebih kaya daripada data yang ditunjukkan dalam hasil survey tersebut (Bank Dunia, 2019).

Akan tetapi, mayoritas keluarga Indonesia dengan penghasilan lebih rendah bukanlah hambatan untuk berinvestasi di Indonesia. Alih-alih, hal tersebut merupakan indikator karakteristik dan batas kecocokan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Australia.

Akan tetapi, mayoritas keluarga Indonesia dengan penghasilan lebih rendah bukanlah hambatan untuk berinvestasi di Indonesia. Alih-alih, hal tersebut merupakan indikator karakteristik dan batas kecocokan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Australia. Saat ini, pengusaha sektor pertanian Australia yang mengeksplorasi peluang perdagangan dan investasi di Indonesia ada di seputar sektor sapi potong atau produk yang kuantitasnya lebih tinggi seperti gandum dan jagung. Pola perdagangan dan investasi ini juga merupakan sebuah tanda kecocokan sektoral antara kedua negara. Misalnya, wawancara kami mengungkap adanya minat tinggi akan perdagangan dan investasi sapi potong di Indonesia, tetapi minat di sektor hortikultura, yang cenderung memiliki margin harga rendah, relatif lebih terbatas (Wawancara 2, 3).

Masalah Lahan

Faktor penting lainnya yang berdampak pada keputusan investor terkait investasi sektor pertanian di Indonesia adalah lahan. Sektor pertanian membutuhkan akses ke lahan yang mencukupi dan sesuai. Tiga masalah penting di Indonesia yang membuat akses ke lahan yang sesuai menjadi sulit bagi investor: konflik lahan, ketersediaan, dan profitabilitas.

Konflik lahan antara penduduk lokal dan investor swasta merupakan hal yang umum di Indonesia, dan ditambah dengan kerumitan kepemilikan lahan di Indonesia, akhirnya membuat investor urung untuk terlibat dalam sistem produksi pangan (Asian Development Bank et al., 2019; Dahlan et al., 2019). Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sebuah organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk reformasi agraria, melaporkan bahwa pada tahun 2019 ada 279 insiden konflik lahan yang mencakup sekitar 734.294 hektar lahan dan berdampak pada sebanyak 109.042 keluarga (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2020).

Konflik lahan terutama sangat umum di sektor perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. KPA menerima 87 laporan insiden konflik lahan hanya di sektor perkebunan saja—membuat sektor perkebunan menjadi sub-sektor paling problematik di industri pertanian dan dalam hal konflik lahan. Kebanyakan konflik lahan muncul di perkebunan tanaman dagang, termasuk tapi tidak terbatas pada, kelapa sawit (29 insiden), karet (6 insiden), tebu (5 insiden), dan hortikultura (3 insiden) (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2020).

Masalah lahan bisa menjadi risiko investasi dengan (tapi tidak secara eksklusif), (1) menciptakan sebuah 'risiko reputasi' untuk investor—terutama ketika kerusakan reputasi bisa diterjemahkan menjadi kerugian finansial, (2) ketidakmampuan investor untuk mengakses lokasi yang hanya bisa diakses oleh penduduk lokal, (3) kerentanan konflik dengan penduduk lokal yang meningkat, seperti sabotase atau pencurian, yang bisa menambah biaya usaha bagi investor (Rutten et al., 2017). Masalah lahan juga bisa muncul ketika pemerintah daerah mengubah rencana penggunaan lahan mereka (Wawancara 9) atau ketika rencananya tidak terlalu jelas dan tidak masuk akal. Frekuensi konflik lahan, terutama pada komoditas tujuan investasi utama, telah membuat masalah lahan menjadi salah satu halangan yang mendasar untuk berinvestasi di sektor pertanian Indonesia.

Frekuensi konflik lahan, terutama pada komoditas tujuan investasi utama, telah membuat masalah lahan menjadi salah satu halangan yang mendasar untuk berinvestasi di sektor pertanian Indonesia.

"... kami memiliki masalah di mana kami memiliki lahan industri yang mereka [pemerintah] ambil kembali, karena mereka ingin membangun jalan tol. Kemudian mereka memutuskan bahwa mereka tidak mau membangun jalan tol di situ. Sehingga, mereka mengembalikannya kepada kami sebagai lahan pemukiman, yang mana tidak lagi menguntungkan bagi kami. Dan kami membutuhkan waktu hampir dua tahun untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pemerintah..." – Daniel McNicol

Ketersediaan lahan menyebabkan masalah lain. Penurunan jumlah lahan pertanian telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya urbanisasi di daerah pedesaan Indonesia yang dianggap sebagai salah satu penyebab perubahan tersebut (Rondhi et al., 2018). Dalam mengembangkan daerah pedesaan, di mana kebutuhan perumahan tinggi, nilai ekonomi lahan meningkat pesat dan kemudian menambah dorongan untuk mengalihkan fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Akibatnya, tingkat konversi lahan di Indonesia adalah 187.720 hektar/tahun, dengan kebanyakan lahan beralih fungsi menjadi lahan pengembangan perumahan dan kawasan industri (Rondhi et al., 2018). Mulyani et al. (2016) memprediksi bahwa dengan tingkat konversi tersebut, ketersediaan lahan untuk penggunaan pertanian akan berkurang dari 8,1 juta hektar pada 2016 menjadi 5,1 juta hektar pada 2045. Tingginya angka konversi mengindikasikan bahwa pemilik lahan, terutama yang ada di daerah pedesaan yang sedang berkembang, digerakkan oleh dorongan untuk mengalihkan fungsi lahan menjadi non-pertanian, dan akhirnya bisa menunjukkan bahwa pertanian bisa jadi bukan kegiatan yang paling menguntungkan di banyak daerah berkembang di Indonesia.

Bahkan ketika lahan tersedia, lahan pertanian Indonesia sering kali kekurangan infrastruktur yang memadai. Hal ini terutama untuk daerah di luar Jawa, di mana lahan yang sesuai untuk pertanian tersedia, namun infrastrukturnya terbatas. Kondisi tersebut kemudian membuat harga tanah garapan yang memiliki akses ke infrastruktur menjadi naik.

Bahkan ketika lahan tersedia, lahan pertanian Indonesia sering kali kekurangan infrastruktur yang memadai.

"... Mudah untuk membeli sedikit lahan di sana-sini, tetapi beda halnya kalau dalam luasan besar. Jika Anda mencari lahan yang luas, maka Anda harus ke daerah di luar pulau [Jawa] dan Anda dihadapkan dengan tantangan infrastruktur yang sangat besar. Semua dari mulai listrik, terutama listrik, jalanan, pengiriman, semuanya menantang..." – Richard Slaney

Investor utama infrastruktur di lahan pertanian adalah petani individu dan pemerintah. Dalam hal pengelolaan air, petani individu, asosiasi petani, dan penduduk lokal kebanyakan berinvestasi di infrastruktur berskala kecil seperti pengaliran air dan irigasi berskala kecil, sementara itu pemerintah kebanyakan berinvestasi di infrastruktur berskala besar seperti bendungan (Asian Development Bank et al., 2019).

Konflik lahan dan kurangnya ketersediaan lahan berarti berinvestasi di lahan pertanian di Indonesia melibatkan biaya yang tinggi dengan risiko yang signifikan. Kesulitan mendapatkan lahan yang sesuai dan risiko potensi konflik mengurangi minat investasi di sektor pertanian, terutama di sub-sektor tanaman pangan yang menghasilkan keuntungan lebih rendah dibandingkan tanaman dagang. Ketika investor memutuskan untuk terlibat, mereka lebih memilih sub-sektor dengan produktivitas dan keuntungan yang lebih tinggi, seperti kelapa sawit atau tanaman dagang. Mereka menerima bantuan pemerintah untuk investasi di perkebunan tanaman dagang dan perkebunan hutan industri untuk bubur kertas

Konflik lahan dan kurangnya ketersediaan lahan berarti berinvestasi di lahan pertanian di Indonesia melibatkan biaya yang tinggi dengan risiko yang signifikan.

dan kertas. Seperti yang ditunjukkan di atas, hanya ada sedikit investasi di area pertanian di mana tingkat produktivitasnya rendah. Ini adalah bagian dari lingkaran setan, di mana kurangnya investasi menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas dan keuntungan di sub-sektor pertanian, yang kemudian membuat investasi menjadi kurang menarik bagi para investor.

Peraturan dan Kebijakan

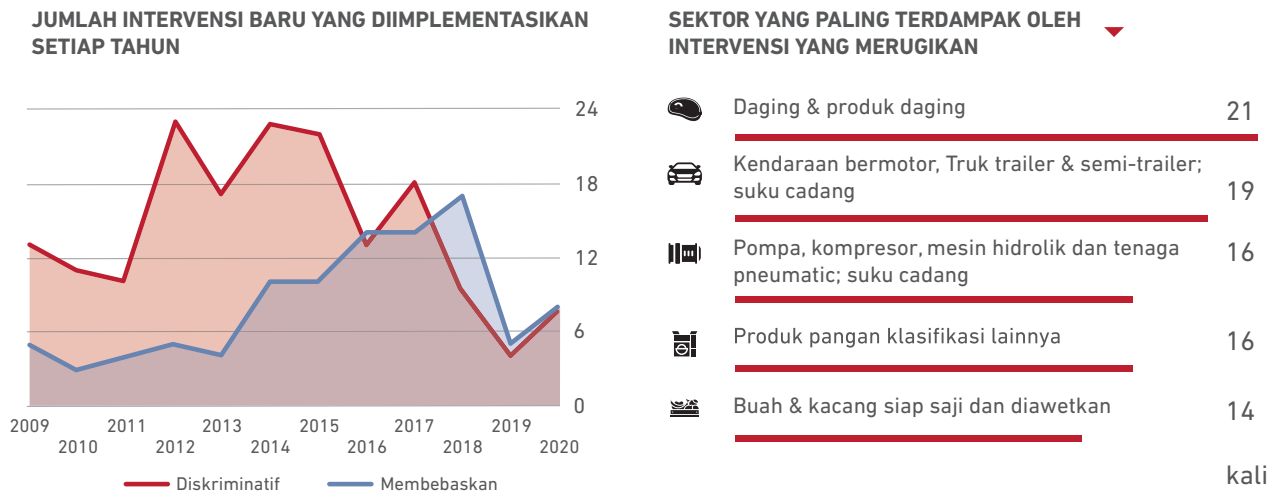
Ada setidaknya tiga bentuk tantangan regulasi untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di sektor pertanian: regulasi yang restriktif, kerumitan regulasi, dan kepastian hukum atau konsistensi kebijakan.

Sebelum pengesahan RUU Omnibus menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Indonesia memiliki pembatasan PMA tertinggi menurut Indeks Hambatan Regulasi Penanaman Modal Asing (FDI RRI) OECD. FDI RRI mengukur empat area pembatasan PMA di antara anggota-anggota OECD dan beberapa mitranya: (1) pembatasan ekuitas asing, (2) pengawasan dan persyaratan sebelum persetujuan, (3) peraturan untuk tenaga kerja utama, dan (4) pembatasan lain untuk operasional perusahaan asing. Indeks ini menggunakan nilai antara 0 dan 1, dengan nilai satu menjadi pembatasan yang paling tinggi. Pada 2019, Indonesia memiliki skor 0,34 untuk total indeks pembatasan, yang paling tinggi di antara negara dengan perekonomian besar (OECD, t.t.).

Sebelum pengesahan RUU Omnibus menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Indonesia memiliki pembatasan PMA tertinggi menurut Indeks Hambatan Regulasi Penanaman Modal Asing (FDI RRI) OECD.

Dengan mengesampingkan kebijakan PMA yang restriktif, intervensi perdagangan Indonesia juga secara negatif berdampak pada hubungan dagang dengan Australia. Menurut Global Trade Alert, ada 171 intervensi dagang yang mengganggu hubungan komersial Indonesia dengan Australia. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9, daging dan produk daging ada di posisi pertama, karena sektor ini adalah yang paling terkena dampak dari intervensi yang merugikan, yaitu 21 intervensi negara. Pemerintah Indonesia memberlakukan kuota impor yang ketat dan hambatan teknis untuk daging dan produk daging dari Australia. Intervensi negara semacam itu tidak hanya merusak akses Indonesia ke produk daging Australia, karena pentingnya Australia sebagai sumber daging untuk Indonesia, tetapi juga akses Indonesia ke produk daging secara umum.

Gambar 9.
Intervensi negara oleh Indonesia yang berdampak pada Australia



Sumber: <https://www.globaltradealert.org/>

Sejalan dengan usaha pemerintah untuk menarik investasi, deregulasi kebijakan dilakukan dengan tujuan untuk membuat sektor pertanian lebih atraktif bagi para investor. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menetapkan deregulasi yang lebih luas terhadap beberapa sektor yang lebih restriktif, misalnya hortikultura. Salah satu perubahan signifikan dalam UU ini adalah penghapusan batas 30% kepemilikan asing di usaha hortikultura. Pemerintah juga mengeliminasi daftar negatif investasinya, dan membebaskan 14 sektor lain dalam daftar tersebut.

Penghapusan batas kepemilikan dan deregulasi lain telah berpotensi membuat investasi di sektor pertanian lebih menarik, namun risiko peraturan baru yang bisa mengganggu investasi di Indonesia tetap ada. Pada sektor hortikultura misalnya, batas investasi sekarang diatur menggunakan peraturan presiden alih-alih dengan UU.⁶ Perubahan dalam undang-undang akan membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun peraturan presiden dapat diubah tanpa persetujuan DPR. Oleh karena itu, batas kepemilikan asing bisa diberlakukan kembali tanpa konsultasi DPR dan tidak ada kepastian bahwa pemerintahan yang akan datang tidak akan memberlakukan batas kepemilikan baru.

Masalah lainnya adalah kerumitan regulasi yang sudah menjadi keluhan utama para investor di Indonesia. Pada 2020, Indonesia menduduki peringkat 72 dari 190 dalam Indeks Kemudahan Berbisnis (EoDB) Bank Dunia, tetapi berada di peringkat 146 dalam hal pelaksanaan kontrak, peringkat 139 dalam hal pembukaan usaha, peringkat 117 dalam hal perdagangan lintas negara, peringkat 111 dalam hal penanganan izin konstruksi, dan peringkat 107 dalam hal pendaftaran properti. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah Indonesia telah mencoba untuk melakukan deregulasi sebagian dari perekonomian Indonesia untuk menarik investor

⁶ Sebelumnya, batas kepemilikan asing untuk Hortikultura diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, tetapi batas investasi dan pembatasan di semua sektor diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Akan tetapi, wawancara yang kami lakukan mengungkap bahwa beberapa investor tetap skeptis akan panjang dan rumitnya proses serta persyaratan untuk mendapatkan izin investasi, serta transparansi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan.

Pemerintah juga mencoba menyederhanakan persyaratan untuk mendapatkan izin investasi dengan memberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) otonomi lebih untuk menerbitkan izin usaha. Sebelumnya, persyaratan PMA di Indonesia mengharuskan investor untuk tidak hanya berkoordinasi dengan kementerian yang berbeda-beda di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga dengan pemerintah daerah dan badan-badan pemerintah. Proses perizinan investasi yang rumit ini tidak efisien dan sangat birokratis.

Selain mengusahakan deregulasi, pemerintah juga mencoba untuk menarik lebih banyak investasi dengan mengesahkan kesepakatan perdagangan dan investasi, termasuk Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) 2020. Karena baru saja disahkan, kesuksesan IA-CEPA dalam menarik investasi di sektor pertanian belum bisa dinilai, namun pengusaha Australia menunjukkan harapan yang tinggi untuk perjanjian ini bisa membuka jalur-jalur perdagangan.

Masalah ketiga adalah kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan. Meskipun bergerak lambat menuju iklim yang kondusif untuk investasi, masih ada skeptisisme di antara para investor mengenai transparansi, konsistensi, dan pelaksanaan kebijakan (Wawancara 4, 5, 6, 8, 11).

"... kami melakukan upaya semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa kami mengikuti mekanisme yang berlaku, sesuai dengan yang dituliskan, sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan peraturan di Indonesia. Dan tetap saja sulit, terutama dengan adanya perubahan kebijakan. Jadi, sekarang Anda tahu, perubahan kebijakan adalah masalah utama yang kami hadapi..." – Greg Pankhurst.

Namun demikian, keputusan usaha jangka panjang, seperti PMA, membutuhkan sebuah tingkat prediktabilitas sehingga risiko dapat diperkirakan dengan baik.

Dalam mengupayakan keuntungan, investor menimbang biaya pemenuhan persyaratan regulasi terhadap potensi profit dari berinvestasi di Indonesia dan mengakses pasarnya. Persyaratan regulasi yang ketat tidak hanya ada di Indonesia, dan para eksportir serta investor telah mengetahui mereka akan menghadapi hal tersebut. Lagi pula, setiap negara berdaulat memiliki aturan dan regulasinya sendiri, dan sudah merupakan tanggung jawab investor untuk mengawasi perubahan-perubahan yang terjadi. Namun demikian, keputusan usaha jangka panjang, seperti PMA, membutuhkan sebuah tingkat prediktabilitas sehingga risiko dapat diperkirakan dengan baik.

Prediktabilitas bukanlah realita yang selalu terjadi di Indonesia. Ironisnya, proses pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja memberikan sebuah contoh. Partisipasi publik dalam membuat RUU tersebut tergolong minim, kemudian proses deliberasi dan pengesahannya pun dilakukan secara diam-diam. Masyarakat tiba-tiba menerima pemberitahuan tentang RUU tersebut dengan lima versi yang berbeda sebelum pengesahannya pada Oktober 2020 (Ghaliya & Gorbiano, 2020). Proses tersebut menciptakan ketidakpastian tentang RUU versi yang mana yang akan disahkan dan memunculkan pertanyaan tentang proses penulisannya.

Indonesia memiliki sejarah perubahan kebijakan yang cepat setiap kali pemerintahan baru dilantik. Kondisi tersebut mengurangi prediktabilitas dan meningkatkan risiko terkait investasi. Sebuah contoh adalah UU Nomor 13 Nomor 2010 tentang Hortikultura yang sudah disebutkan sebelumnya, UU ini disahkan saat masa pemerintahan Presiden Yudhoyono. Sebelum pengesahan UU Hortikultura, Indonesia mengizinkan hingga 95% kepemilikan asing di sektor hortikultura dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). UU Hortikultura tiba-tiba memberlakukan batas 30% untuk kepemilikan asing dan peraturan pelaksanaannya memberlakukan blokir sementara untuk impor 15 produk hortikultura, menyebabkan naiknya harga komoditas-komoditas yang terdampak (Bank Dunia, 2014). Investor asing di sektor hortikultura dengan kepemilikan di atas batas baru tersebut diberikan waktu empat tahun untuk melepas kepemilikan mereka. Pemerintah Presiden Widodo dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi mempertegas kembali iklim investasi yang tertutup ini. Lima tahun kemudian, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membalikkan perubahan tersebut dengan menghapuskan batas kepemilikan asing di sektor hortikultura. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, yang merupakan peraturan pelaksanaan PMA terkait UU Cipta kerja, menghapuskan hortikultura dari daftar sektor usaha yang hanya terbuka untuk investasi “dengan persyaratan khusus”. Meskipun perubahan tersebut bersifat positif, penghapusan batas kepemilikan asing di sektor hortikultura diatur di bawah Peraturan Presiden, sehingga perubahan besar di masa depan masih mungkin terjadi tanpa konsultasi dengan DPR.

Indonesia memiliki sejarah perubahan kebijakan yang cepat setiap kali pemerintahan baru dilantik. Kondisi tersebut mengurangi prediktabilitas dan meningkatkan risiko terkait investasi.

Contoh lain perubahan regulasi yang berdampak pada keterbukaan investasi ada di industri minuman beralkohol. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 awalnya mencakup minuman beralkohol dalam daftar sektor usaha yang terbuka untuk investasi “dengan persyaratan khusus”. Akan tetapi, setelah respons keras dari masyarakat—terutama dari kelompok religius—Presiden Joko Widodo tiba-tiba memutuskan untuk menghapus minuman beralkohol dari daftar (Sekretariat Presiden, 2021). Kasus tersebut menggambarkan bahwa bahkan ketika deregulasi yang diusung oleh pimpinan negara bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi, tekanan masyarakat bisa mengubah arah kebijakan.

Kebijakan Swasembada Pangan

Lebih dari tantangan yang muncul akibat kepastian dan kerumitan regulasi adalah iklim regulasi di sektor pertanian secara keseluruhan. Kebijakan pertanian Indonesia sangat dikendalikan oleh negara dan digerakkan berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang bertujuan swasembada. Swasembada pangan telah menjadi isu yang sangat dipolitisasi sejak demokrasi tahun 1998 dan berkontribusi terhadap ketidakpastian bagi para investor di sektor ini. Pemerintah memegang kendali yang signifikan untuk pengelolaan rantai pasok komoditas pangan yang strategis, terutama tapi tidak terbatas pada beras, daging sapi, cabai, dan jagung.

Hambatan impor dan ekspor pada produk pangan diberlakukan dengan minim konsultasi publik ketika harga terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau ketika pemerintah menganggap pasokan domestik tidak mencukupi. Intervensi merupakan hal yang umum dalam komoditas pangan

yang sensitif secara politis. Tarif barang impor cenderung rendah dan telah menurun selama tiga puluh tahun terakhir, namun pembatasan impor tanaman pangan dan produk pangan tetap ada dalam bentuk hambatan non-tarif (Marks & Rahardja, 2012). Sebelum mengirimkan produk mereka ke Indonesia, para eksportir pangan harus mendapatkan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), mendaftarkan produknya di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan mendapatkan izin impor, rekomendasi, dan izin masuk dari Kementerian Pertanian (Australian Food & Grocery Council, 2020). Pada tahun 2018, lebih dari 95% impor hewan, sayuran, dan produk pangan di Indonesia dikenakan hambatan non-tarif (Munadi, 2019).

Intervensi ini tidak hanya gagal mencapai tujuan stabilitas harga, seperti yang ditunjukkan oleh adanya inflasi harga pangan yang tinggi, namun juga mengganggu harga sebagai sinyal pasar kepada investor. Harga yang terganggu dan ketidakpastian kebijakan membuat investasi di sektor pertanian menjadi hal yang berisiko dengan keuntungan yang sulit diprediksi.

Intervensi ini tidak hanya gagal mencapai tujuan stabilitas harga, seperti yang ditunjukkan oleh adanya inflasi harga pangan yang tinggi, namun juga mengganggu harga sebagai sinyal pasar kepada investor. Harga yang terganggu dan ketidakpastian kebijakan membuat investasi di sektor pertanian menjadi hal yang berisiko dengan keuntungan yang sulit diprediksi. Keputusan investasi jangka panjang di sektor pertanian tidak dapat didasari oleh harga pangan tinggi buatan dan bersifat sementara. Terlebih lagi, intervensi pemerintah menciptakan celah politis yang bisa mendorong terjadinya korupsi. Banyak politisi telah didakwa atas kasus korupsi dan penyuapan impor daging sapi, beras, dan bawang putih.

Kebijakan yang proteksionis juga mengurungkan minat investor, karena menciptakan risiko politis terkait investasi di sektor pertanian. Oleh karena itu, keterbukaan perdagangan tidak hanya akan menurunkan harga pangan, namun juga akan menghilangkan dampak gangguan dari kebijakan sebelumnya di sektor ini, sehingga mengizinkan investor untuk bisa menilai peluang dan potensi dengan lebih baik. Membiarkan harga untuk ditentukan oleh pasar akan memperbolehkan baik petani dan investor untuk memahami sumber daya yang mereka bisa gunakan, seperti yang diindikasikan melalui tingkat keuntungan—yang kemudian akan menurunkan harga pangan. Produksi daging sapi, di mana Australia memiliki keunggulan komparatif, adalah contoh konkrit.⁷ Wawancara kami memastikan bahwa memproduksi daging sapi lebih mahal di Indonesia daripada di Australia (Wawancara 1, 8), sementara itu keunggulan komparatif Indonesia ada di sektor perikanan dan unggas. Kebijakan proteksionis produksi daging sapi tidak hanya membuat harga daging sapi lebih mahal bagi konsumen Indonesia, tetapi juga menjauhkan investasi swasta dari sektor di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif, seperti sektor perikanan dan unggas.

Kebijakan perdagangan penting untuk keputusan investasi, karena perdagangan memberikan investor pengetahuan lokal yang dibutuhkan sebelum melakukan penanaman modal.

⁷ Keunggulan komparatif diukur menggunakan indeks *Revealed Comparative Advantage*, dirilis oleh UNCTAD (2019). Dapat diakses di: <https://unctadstat.unctad.org/en/RcaRadar.html>

Terlebih lagi, model standar Kepemilikan, Lokasi, dan Internalisasi (OLI) yang dikemukakan oleh Dunning (1973) berargumen bahwa agar sebuah perusahaan multinasional bisa terlibat dalam PMA yang menguntungkan, perusahaan tersebut harus mampu memadukan keunggulan komparatifnya dengan keunggulan komparatif lokal yang menjadi tujuan investasi dan menginternalisasikan kedua keunggulan dalam proses produksi. Dalam banyak kasus, internalisasi keunggulan tersebut membutuhkan jaringan produksi yang memadukan bahan baku impor dari negara asal dengan proses produksi di negara tujuan PMA. Sebuah contoh yang sesuai dengan model OLI adalah mengimpor sapi potong dari Australia ke tempat penggemukan ternak *joint venture* di Indonesia, yang kemudian menggunakan input lokal untuk memberi makan sapi potong impor sekitar 100 hari sebelum mereka dikirim ke rumah jagal (Wawancara 1, 6, 8). Proses ini memadukan keunggulan komparatif Australia dalam hal pembiakan sapi potong dengan keunggulan Indonesia dalam hal pakan. Proses ini sangat bergantung pada keterbukaan perdagangan.

Kelemahan Kelembagaan dan Data yang Tidak Akurat

Selain kebijakan regulasi yang tidak konsisten, Indonesia juga kekurangan institusi hukum yang kuat untuk menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi para investor. Satu investor Australia menyebutkan kapasitas pelaksanaan kontrak yang lemah di Indonesia, dan hanya ada sedikit kepercayaan bahwa sistem peradilan Indonesia akan memperlakukan warga asing secara adil (Wawancara 1). Hal tersebut penting karena iklim usaha yang aman perlu untuk kemudahan berbisnis dalam sebuah perekonomian. Indeks EoDB menilai apakah peradilan bisa menangani kasus-kasus komersial yang rumit secara efisien dengan badan peradilan khusus, yang akan meningkatkan kondisi investasi di Indonesia. Indonesia saat ini berada pada peringkat 146 dari 190 negara dalam hal pelaksanaan kontrak dan peringkat 36 dari 190 negara dalam hal menyelesaikan kondisi gagal bayar (insolvensi).

Konsistensi antar kementerian dalam pemerintah penting untuk PMA di sektor pertanian. Investor Australia menyampaikan bahwa perbedaan implementasi kebijakan perdagangan dan investasi antar kementerian bisa menciptakan masalah untuk investasi mereka (Wawancara 2, 6, 7). Kondisi tersebut menunjuk perlunya koordinasi yang lebih baik antar kementerian dan badan pemerintah, dan peningkatan kapasitas kelembagaan di badan-badan terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Seorang sumber yang diwawancara juga menyebutkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan komunikasi antara investor dan pemerintah (Wawancara 6).

Investor Australia menyampaikan bahwa perbedaan implementasi kebijakan perdagangan dan investasi antar kementerian bisa menciptakan masalah untuk investasi mereka (Wawancara 2, 6, 7).

"... Masalah terbesar di kalangan pemerintah kemungkinan adalah kementerian yang berbeda memiliki pendekatan yang berbeda terhadap isu-isu ini dan oleh karena itu, Anda tidak mendapatkan kebijakan yang konsisten antar pemerintah..." "...Saya tidak bicara mengenai korupsi di sini, saya berbicara tentang kemampuan untuk duduk bersama dan berbicara ketika ada masalah..." – Richard Slaney

Indonesia juga mengalami masalah akurasi data, terutama terkait statistik mengenai komoditas pangan (Ruslan, 2019). Data yang akurat diperlukan oleh Kementerian Pertanian,

yang bertanggung jawab mengeluarkan perizinan, rekomendasi impor, dan izin masuk untuk memperbolehkan impor beragam produk pangan. Data yang tidak akurat bisa menciptakan rasa percaya diri yang berlebihan dalam pembuatan kebijakan dan dapat memiliki konsekuensi buruk. Data yang tidak akurat juga menyebabkan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan sektor swasta pada statistik resmi. Pada tahun 2018 misalnya, harga beras domestik tetap tinggi dan Indonesia mengimpor 2,25 juta ton beras meskipun angka resmi yang menunjukkan produksi beras nasional surplus melewati 10 juta ton. Di tahun yang sama, Indonesia mengimpor 731.000 ton jagung sementara statistik produksi jagung domestik mencatat angka surplus sebesar 14,6 juta ton (Ruslan, 2019). Ketidakkampuan pemerintah untuk menentukan keluaran komoditas yang dipanen yang sesungguhnya merefleksikan kelemahan kelembagaan dari badan pemerintah yang mengatur sektor pertanian.

Data yang tidak akurat bisa menciptakan rasa percaya diri yang berlebihan dalam pembuatan kebijakan dan dapat memiliki konsekuensi buruk. Data yang tidak akurat juga menyebabkan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan sektor swasta pada statistik resmi.

Perbedaan Budaya dan Menemukan Mitra Usaha Lokal

Sebagai negara tetangga, masyarakat di Indonesia dan Australia ternyata memiliki kesadaran terbatas tentang karakteristik tetangga mereka. Perbedaan budaya, sejarah, dan linguistik menjadi hambatan berat yang memisahkan kedua negara ini lebih dari lautan di antara mereka. Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Australia-Indonesia Centre pada tahun 2016, hanya 22% orang Australia yang setuju bahwa orang Indonesia adalah orang yang dapat dipercaya, dan 13% setuju bahwa Indonesia adalah negara yang bisa dipercaya. Di saat yang sama, 44% orang Indonesia setuju bahwa orang Australia adalah orang yang bisa dipercaya, dan 53% setuju bahwa Australia adalah negara yang bisa dipercaya (EY Sweeney, 2016). Kurangnya pemahaman dan adanya persepsi yang negatif juga diperlihatkan dalam sebuah poling oleh Lowy Institute pada tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa hanya 50% responden Australia yang secara pribadi setuju bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan 1% orang Australia merasa bahwa Indonesia adalah "teman terbaik Australia di dunia", lebih rendah daripada RRT atau Jepang, apalagi Amerika Serikat atau Britania Raya (Lowy Institute, 2019).

Perbedaan mendasar antara kebudayaan Australia dan Indonesia adalah dalam tipe komunikasi, yang merupakan hambatan yang krusial. Masyarakat dalam kebudayaan Barat, seperti Australia, cenderung menyampaikan perasaan mereka secara verbal dan dapat dengan nyaman mengkritik orang lain secara langsung (Giri, 2006). Bahasa tulisan atau lisan lebih penting daripada konteks komunikasi. Sementara itu, Indonesia secara umum menganut kebudayaan Asia, yang memiliki karakter untuk berkomunikasi dengan cara yang tidak langsung dengan orang lain. Masyarakat Indonesia cenderung berkomunikasi secara tidak langsung untuk menghindari konflik dan untuk menciptakan iklim kerja yang menyenangkan (Panggabean, 2004). Konteks sosial komunikasi seringkali lebih penting dari bahasa tulisan atau lisan. Di kedua negara, daerah pedesaan lebih terpencil secara budaya, sehingga daerah-daerah ini lebih sedikit terpapar pada perbedaan-perbedaan kebudayaan, yang membuat urusan dengan budaya asing, meskipun hanya untuk melakukan kegiatan usaha, lebih sulit.

Gesekan budaya ini bisa menjadi hambatan yang signifikan untuk membangun usaha yang menguntungkan di negara asing, terutama di fase-fase awal. Kesadaran budaya berdampak pada bagaimana sebuah usaha beroperasi, pada produknya, dan pada interaksi antar sesama pegawai, pemasok, konsumen, pemerintah, dan masyarakat lokal. Sektor pertanian menunjukkan masalah yang unik dalam aspek ini, karena kebutuhan lahan yang luas berarti usaha akan selalu dilaksanakan di daerah pedesaan, di mana tradisi lokal lebih kuat dan interaksi dengan pemerintah daerah serta warga lokal cenderung lebih intens. Ketidakpekaan terhadap kode-kode kebudayaan bisa berakibat pada konflik dengan pemangku kepentingan, dan bahkan masalah hukum yang bisa mengganggu investasi.

Kesadaran budaya berdampak pada bagaimana sebuah usaha beroperasi, pada produknya, dan pada interaksi antar sesama pegawai, pemasok, konsumen, pemerintah, dan masyarakat lokal.

Sama halnya dengan keputusan usaha lainnya, risiko PMA harus dinilai dan dimitigasi. Dalam kasus risiko kebudayaan, hal ini dilakukan dengan mempelajari budaya dan bahasa lokal dan menyesuaikan praktik usaha guna membangun kepercayaan dan melakukan usaha yang sukses di Indonesia. Mengetahui cara mengatasi rintangan birokrasi, mendapatkan sumber lokal untuk input dan tenaga kerja lokal, serta membangun reputasi yang positif adalah bagian dari kesadaran kebudayaan. Memahami perbedaan selera, termasuk antar daerah di Indonesia, juga membantu usaha-usaha untuk melayani pasar domestik dengan mengembangkan produk yang sesuai. Seluruh faktor ini adalah pengetahuan lokal dan tidak selalu bisa diakses dengan mudah oleh investor asing.

"Apa tiga hal paling penting untuk memulai investasi di Indonesia? Ada tiga hal. Pertama adalah mitra usaha bersama yang tepat. Kedua adalah mitra usaha bersama yang tepat. Dan ketiga adalah mitra usaha bersama yang tepat." – Greg Pankhurst

Salah satu cara untuk memitigasi risiko-risiko ini adalah dengan menemukan mitra usaha yang tepat. Wawancara dengan beberapa investor Australia yang telah berhasil mengelola usaha yang menguntungkan di Indonesia mengonfirmasi bahwa menemukan mitra usaha lokal yang sesuai adalah satu faktor yang paling penting ketika menjalankan usaha di Indonesia. Mitra usaha lokal yang tepat bisa menjembatani perbedaan kebudayaan dan mengizinkan investor Australia untuk menavigasi kerumitan masyarakat Indonesia. Hubungan yang saling menguntungkan ini adalah cara untuk memadukan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif kedua negara.

Wawancara dengan beberapa investor Australia yang telah berhasil mengelola usaha yang menguntungkan di Indonesia mengonfirmasi bahwa menemukan mitra usaha lokal yang sesuai adalah satu faktor yang paling penting ketika menjalankan usaha di Indonesia.

"... Anda harus memiliki mitra lokal yang fantastis. Jika tidak, menyerah saja dari awal. Jangan coba-coba, karena tanpa kemampuan lokal untuk bernegosiasi, untuk menyelesaikan masalah birokrasi, menurut saya, untuk mengingini kondisi yang lebih baik, Anda akan selalu berada di situasi yang tidak nyaman. Maka saya rasa tanpa mitra yang tepat, jangan coba-coba." – Daniel McNicol

Akan tetapi, hubungan ini tidak mudah untuk dibangun. Hubungan ini memerlukan rasa saling percaya yang tinggi, dan setiap kasus selalu berbeda. Greg Pankhurst, Ketua Queensland Livestock Exporters Association, yang telah melakukan usaha di Lampung, Indonesia lebih dari

20 tahun, menemukan mitra usaha lokalnya ketika ia bekerja untuk perusahaan Indonesia pada tahun 1992.⁸ Saat itu, mitra usahanya adalah atasannya langsung. Daniel McNicol, Direktur Utama Agricom, yang telah melakukan usaha di Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun, bermitra dengan bekas pegawainya dari usaha sebelumnya.⁹ Garry Embleton, Direktur Utama Ausfine Food Internasional, yang telah menjalankan usahanya di Indonesia selama enam tahun, mengenal Manajer Ausfine di Indonesia melalui kesepakatan perdagangan sebelumnya di Indonesia. Di setiap kasus, menemukan mitra usaha yang tepat di Indonesia membutuhkan interaksi berulang untuk membangun kecocokkan dan kepercayaan.

Wawancara kami dengan Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) di Sydney mengungkapkan bahwa IIPC menggunakan pendekatan personal untuk menyocokkan investor Australia yang baru dengan mitra lokal potensial yang ada di data keanggotaan dari asosiasi usaha di Indonesia (Wawancara 11). Sementara pendekatan perjodohan personal ini bekerja dengan baik, pendekatan yang lebih umum bagi investor untuk menemukan mitra lokal sangat diperlukan.

Keterampilan dan Tenaga Kerja

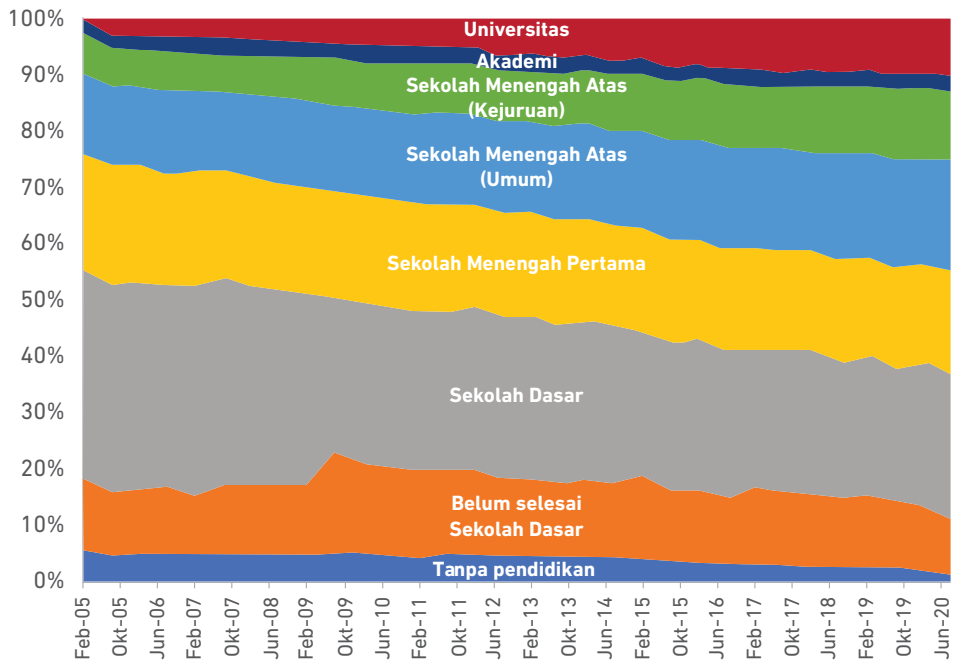
Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, Indonesia adalah rumah bagi sekitar 204 juta warga usia kerja (di atas 15 tahun), di mana 138 juta dari mereka sudah bekerja¹⁰ (Badan Pusat Statistik, 2020). Survei yang sama juga menunjukkan bahwa mayoritas pekerja Indonesia adalah tenaga kerja berketerampilan rendah dan hanya 9,7% pekerja yang memiliki gelar universitas. Gambar 10 menunjukkan bagaimana angka-angka ini berubah seiring bertambahnya warga Indonesia yang menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, dan universitas, lebih banyak dari sebelumnya.

⁸ Wawancara dengan Greg Pankhurst

⁹ Wawancara dengan Daniel McNicol

¹⁰ Didefinisikan sebagai orang-orang berusia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, sementara tidak bekerja, atau mencari kerja.

Gambar 10.
Komposisi Tenaga Kerja berdasarkan Pencapaian Edukasi Tertinggi di Indonesia



Sumber: Kumpulan data CEIC, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Badan Pusat Statistik, 2020).

Meskipun angka penduduk dengan gelar pendidikan menengah atas dan dengan pendidikan tersier di bursa tenaga kerja bertumbuh, Indonesia tetap kekurangan tenaga kerja profesional yang kompeten. Ketidakcocokan keterampilan adalah hal yang umum dan bursa tenaga kerja terus mengalami kekurangan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Asian Development Bank (ADB) memperkirakan bahwa 51,5% pekerja tidak memenuhi kualifikasi, 40% cocok dengan kualifikasi, dan 8,5% melebihi kualifikasi (Allen, 2016). Sebuah survei oleh Talent in Asia mengungkapkan bahwa lebih dari setengah perusahaan yang ada di Indonesia kesulitan merekrut kandidat yang sesuai (RGF, 2019).

Tantangan bursa tenaga kerja juga berdampak pada sektor pertanian. Pekerjaan di sektor pertanian membutuhkan tenaga kerja terampil untuk berperan sebagai misalnya staf pertanian, mekanik, insinyur, dan manajer usaha peternakan. Namun, hanya sekitar 2% lulusan universitas di Indonesia bekerja di sektor pertanian, sementara mayoritas yang lainnya mengejar karir di industri manufaktur dan jasa (Nambiar, Karki, Rahardiani, Putri, & Singh, 2019). Akibatnya, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) hanya memiliki empat peneliti yang mempelajari varietas padi hibrida dan inbrida, sementara pusat penelitian serupa di RRT melibatkan ratusan peneliti (Krishnamurti & Biru, 2019).

Pekerjaan di sektor pertanian membutuhkan tenaga kerja terampil untuk berperan sebagai misalnya staf pertanian, mekanik, insinyur, dan manajer usaha peternakan.

Ketidakcocokan keterampilan dan kurangnya tenaga terampil bisa diatasi melalui kursus dan pelatihan singkat. Kebanyakan dari sepuluh posisi yang paling dibutuhkan, termasuk insinyur, manajer proyek, dan ahli keamanan siber, membutuhkan pelatihan

lanjutan tetapi bukan gelar universitas lengkap (Manpowergroup, 2018). Boston Consulting Group menyarankan perusahaan Indonesia untuk menggunakan program pelatihan dan pengembangan terakselerasi untuk mengambil bagian dalam mengurangi kelangkaan tenaga kerja terampil (Tongg dan Waltermann, 2013). Program tersebut bisa dalam beragam bentuk, termasuk universitas korporat atau pusat pelatihan untuk pemasok dan konsumen (Tongg dan Waltermann, 2013). Jika perusahaan Indonesia mengambil tanggung jawab tersebut, pelatihan bisa ditargetkan untuk mempersingkat kerangka waktu dan secara lebih langsung menjawab kebutuhan pekerja dan perusahaan.

Untuk meningkatkan keterampilan kerja di sektor pertanian, warga Indonesia juga bisa mengambil manfaat dari Visa Kerja dan Liburan (WHV) Australia. WHV memberikan warga Indonesia peluang untuk bekerja di Australia hingga 12 bulan di berbagai sektor, termasuk pertanian. Hortikultura adalah salah satu sektor terbesar yang mempekerjakan pemegang WHV, yang mencapai 50%-85% total pekerja hortikultura musiman (Tan dan Lester dikutip dalam Reilly, 2015). Hingga tahun 2019, hanya 1.000 WHV per tahun yang dialokasikan untuk warga Indonesia, tetapi IA-CEPA meningkatkan alokasinya menjadi 4.000 visa di awal tahun 2020.

“ Untuk meningkatkan keterampilan kerja di sektor pertanian, warga Indonesia juga bisa mengambil manfaat dari Visa Kerja dan Liburan (WHV) Australia. ”

Dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dominasi BUMN dalam perekonomian Indonesia sering kali dikutip sebagai alasan kurangnya partisipasi sektor swasta dan maka itu juga sebagai halangan untuk PMA. Prevalensi BUMN dimulai di bawah pemerintahan Soeharto (Innovasjon Norge, 2017). Saat masa pemerintahan Joko Widodo, ada empat belas sektor yang didominasi oleh BUMN: informasi dan komunikasi, profesional, ilmu pengetahuan dan teknis, konstruksi, transportasi dan gudang penyimpanan, navigasi penerbangan, perdagangan dan ritel, pertanian, perikanan dan kehutanan, pasok energi, pertambangan dan penggalian, jasa keuangan dan asuransi, pengolahan air minum, saluran pembuangan dan sampah, akomodasi, perumahan, dan industri manufaktur (Januarti, Faisal & Situmorang, 2019). Akan tetapi, kinerja BUMN sudah menurun sejak puncaknya—tahun 2018, di mana saat ini Indonesia memiliki 118 BUMN, berkurang dari 158 BUMN pada tahun 2002 (Khatri & Ikhsan, 2020).

“ Pemerintah memberikan insentif dan subsidi kepada BUMN, mengemas kebijakan pajaknya untuk memenuhi target proteksionis, dan memiliki serta mengarahkan BUMN untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Melalui semua kebijakan tersebut, pemerintah mendorong realokasi sumber daya dari hal produktif lain ke upaya swasembada pangan yang mahal dan cenderung tidak realistis. ”

Pengendalian oleh negara yang begitu kuat untuk pengelolaan komoditas pangan membuat sektor ini sangat sarat akan dominasi BUMN. Pemerintah memberikan insentif dan subsidi kepada BUMN, mengemas kebijakan pajaknya untuk memenuhi target proteksionis, dan memiliki serta mengarahkan BUMN untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Melalui semua kebijakan tersebut, pemerintah mendorong realokasi sumber daya dari hal produktif lain ke upaya swasembada pangan yang mahal dan cenderung tidak realistis.

Dengan dukungan negara yang membuat mereka kebal terhadap mekanisme pasar serta adanya subsidi pemerintah, dominasi BUMN berpotensi mengurangi minat investasi sektor swasta dan akhirnya mengurangi persaingan yang ada. Akibatnya, dampak dominasi BUMN dirasakan bukan hanya oleh investor asing potensial, namun juga oleh investor lokal (Wawancara 6). Sektor swasta telah meminta lebih banyak kemitraan negara-swasta (*public-private partnership*) dan partisipasi lebih besar dari sektor swasta di proyek-proyek pembangunan utama di Indonesia (PwC, 2016).

Sudah ada beberapa upaya untuk privatisasi BUMN guna mendorong persaingan dalam perekonomian Indonesia, namun upaya tersebut sudah ditinggalkan. Salah satu argumen yang paling sering dikemukakan untuk privatisasi BUMN adalah kerugian finansial mereka dan produktivitas yang rendah (BPHN, 2005). Di bawah pemerintahan Presiden Widodo, pemerintah mengalihkan fokusnya dari privatisasi menjadi pengembangan infrastruktur (Khatri & Ikhsan, 2020), termasuk melalui perluasan peran BUMN guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Sayangnya, strategi ini harus dibayar dengan profitabilitas dan produktivitas yang lebih rendah (Kim, 2019).

Sebuah contoh penting dominasi BUMN di sektor pertanian adalah di industri gula. Rezim orde baru Presiden Soeharto memaksa petani tebu kecil untuk memasok hasil panen mereka bagi penggilingan milik negara (Fane & Warr, 2008). Meskipun praktik ini dieliminasi saat demokratisasi tahun 1998, pembatasan investasi terus berlanjut, sehingga penggilingan gula tua kesulitan mendapatkan pembaruan, dan pengendalian impor juga diperketat. Hal tersebut menyebabkan kelangkaan gula dan tingginya harga domestik.

Dominasi BUMN di sektor pertanian, terutama pangan, ditunjukkan dengan keberadaan Bulog, perusahaan logistik milik negara di sektor pangan. Bulog memiliki sejarah panjang dalam mengendalikan pasok pangan, terutama beras, dengan obyektif utamanya untuk mengelola ketersediaan pangan¹¹. Saat ini, Bulog ditugaskan untuk mengelola ketersediaan dan stabilitas harga 11 komoditas: beras, jagung, kacang kedelai, gula, minyak goreng, tepung gandum, bawang bombai, cabai, daging sapi, ayam, dan telur. Tugas tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang peran Bulog dalam keamanan pangan nasional. Terlepas dari kegiatan Bulog, harga pangan di Indonesia telah meningkat lebih banyak dibandingkan barang lain dalam satu dekade terakhir, terutama ketika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Bisa dikatakan Bulog tidak berhasil mencapai tujuannya untuk menstabilkan harga. Kondisi tersebut menyebabkan sektor swasta dan investor asing memiliki opsi yang tidak menarik, yaitu untuk berinvestasi di bawah bayang-bayang Bulog atau tidak berinvestasi sama sekali.

Dominasi BUMN di sektor pangan cenderung akan meningkat dengan rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk membuat perusahaan induk industri pangan milik negara dan menggabungkan beberapa BUMN. Sebuah surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-1131/MBU/12/2020 tertanggal 1 Desember 2020 menugaskan PT Perinus dan Perindo, dua perusahaan milik negara yang berfokus pada sektor perikanan, untuk melakukan merger. BUMN di Indonesia dibagi menjadi Persero yang modalnya dibagi antara pemerintah dan pihak lain, dan

¹¹ Untuk diskusi yang lebih rinci, baca Arshad, Arifin, & Tey (2019).

Perum (perusahaan umum) yang modalnya sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah tanpa struktur pemegang saham dan biasanya memiliki kewajiban pelayanan publik. Merger perusahaan ini ditujukan untuk mengendalikan usaha hulu dan hilir sektor perikanan, dari usaha pelabuhan hingga lelang ikan dan pariwisata bahari (Kementerian BUMN, 2021). Selain menggabungkan kedua BUMN sektor perikanan, media melaporkan bahwa PT Pertani (Persero) akan merger dengan PT Sang Hyang Sri (Persero) karena keduanya memproduksi bibit (Tempo, 2020). Selain itu, gudang penyimpanan juga akan dikelola oleh PT Bhandha Ghara Reksa (Persero), sementara perdagangan internasional dan domestik akan dilaksanakan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia akan memiliki peran dalam mendistribusikan produk pangan milik negara hingga ke pembeli dan penjual eceran. Perusahaan-perusahaan yang sudah disebutkan tadi akan bergabung dalam perusahaan induk industri pangan milik negara yang dikepalai oleh PT RNI. Pendirian perusahaan induk dan merger beberapa BUMN tersebut berpotensi menurunkan tingkat persaingan dan menunjukkan niat pemerintah untuk tetap mendominasi sektor pertanian dan pangan.

OPSI KEBIJAKAN DI MASA YANG AKAN DATANG DAN CATATAN PENUTUP

Dihadapkan dengan tantangan untuk menyediakan pangan berkualitas tinggi yang terjangkau bagi populasi yang berkembang, Indonesia harus mempertimbangkan semua opsi yang tersedia. Harga pangan di Indonesia telah meningkat lebih cepat dibandingkan negara-negara tetangga, sementara itu investasi asing di sektor pertanian, terutama di sub-sektor tanaman pangan, cenderung minim. Kombinasi tinggi dan meningkatnya harga pangan serta rendahnya kualitas pangan tidak bisa dibiarkan terus menerus. Meskipun pemerintah mengusulkan integrasi ke perekonomian global dan mendorong PMA, kebijakan pangan Indonesia yang relatif proteksionis dan ketidakjelasan sikap terhadap investasi asing merupakan masalah besar. Mengatasi tantangan untuk menyediakan pangan berkualitas tinggi yang terjangkau membutuhkan komitmen akan keterbukaan perdagangan dan niat untuk melakukan perubahan kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi di sektor pertanian Indonesia.

Makalah ini telah membahas beberapa isu terkait yang memengaruhi investor potensial di sektor pertanian Indonesia. PMA di sektor pertanian penting karena bisa membawa teknologi baru, kapasitas manajerial, dan pengetahuan serta koneksi ke pasar global. Sementara itu, pengambilan keputusan PMA tidak hanya didasari oleh indikator ekonomi makro dan indeks kemudahan berbisnis. Meskipun indikator-indikator tersebut tetap penting, investasi di sektor pertanian memiliki tantangan unik—yang membutuhkan pendekatan yang berbeda.

Masalah lahan merupakan isu yang paling dipertimbangkan dalam membuat keputusan untuk berinvestasi di sektor ini. Menemukan lokasi yang tepat penting untuk segala usaha, namun mutlak untuk usaha di sektor pertanian. Mengatasi masalah seputar mendapatkan lahan yang tepat membutuhkan kejelasan dalam hal kepemilikan lahan, terutama di daerah pedesaan Indonesia. Selain itu, potensi konflik agraria antara warga lokal dan investor merupakan risiko signifikan bagi investor, dan dianggap sebagai risiko investasi.

Solusi tradisional untuk meningkatkan iklim investasi, seperti perbaikan infrastruktur, termasuk jalan raya, pelabuhan, dan akses listrik di luar Pulau Jawa juga penting untuk investasi pertanian. Lahan berskala besar untuk usaha pertanian hanya tersedia di luar Jawa, namun di luar Jawa infrastruktur masih kurang berkembang. Sementara itu, infrastruktur yang memadai penting untuk investasi pertanian yang menguntungkan. Beberapa investor bersedia untuk membangun sendiri infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung usaha mereka, namun margin yang tidak terlalu besar dari kebanyakan tanaman pangan tidak bisa menutupi biaya pembangunan infrastruktur.

Perubahan lebih luas terhadap kebijakan pangan juga diperlukan. Narasi swasembada telah berakibat pada proteksionisme yang mengganggu baik sektor pangan maupun konsumennya. Bahkan ketika swasembada merupakan target yang realistis, dia tetap merupakan target yang mahal untuk dicapai, yang harus dibayar dengan harga pangan domestik yang lebih tinggi, diversifikasi konsumsi pangan yang minim, dan alokasi sumber daya langka yang tidak optimal. Terlebih lagi, dominasi BUMN di sektor pertanian perlu untuk dikurangi

Bahkan ketika swasembada merupakan target yang realistis, dia tetap merupakan target yang mahal untuk dicapai, yang harus dibayar dengan harga pangan domestik yang lebih tinggi, diversifikasi konsumsi pangan yang minim, dan alokasi sumber daya langka yang tidak optimal.

jika sektor swasta dan investor diharapkan untuk berkontribusi terhadap pengembangan sektor pertanian. Kebijakan proteksionis di sektor pertanian, yang mengganggu harga dan mengurangi investasi, harus dihapuskan. Proses impor untuk produk pertanian dapat dan seharusnya disederhanakan. Mengingat importir mendapatkan pengetahuan lokal yang bisa membantu mereka berinvestasi di Indonesia, maka menurunkan tingkat proteksi dapat meningkatkan, bukan hanya keterjangkauan pangan, namun juga iklim investasi di sektor pertanian.

Memperbaiki prediktabilitas regulasi juga merupakan hal yang penting untuk mendorong investasi. Meskipun deregulasi melalui perubahan kebijakan seperti pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah langkah yang tepat, pelaksanaannya bisa berubah menanggapi tekanan dari masyarakat. Artinya, bahkan ketika peraturan yang baik sudah disahkan, iklim regulasi tetap berisiko bagi investor potensial. Investor perlu mempercayai tidak hanya bahwa perbaikan kebijakan bisa terjadi, tetapi juga bahwa perbaikan akan bisa diprediksi dan bertahan, dan bila ada kebijakan yang menyulitkan investor, maka implementasinya akan sewajarnya dan masuk akal.

Pemerintah, dari mulai kementerian pemerintah pusat hingga tingkat daerah, harus bisa diandalkan, diprediksi, dan secara adil menangani masalah yang muncul seiring dengan masuknya penanaman modal asing.

Kapasitas kelembagaan perlu ditingkatkan. Pemerintah, dari mulai kementerian pemerintah pusat hingga tingkat daerah, harus bisa diandalkan, diprediksi, dan secara adil menangani masalah yang muncul seiring dengan masuknya penanaman modal asing. Hal ini merupakan tantangan jangka panjang tanpa solusi yang jelas, tetapi upaya untuk memotong kerumitan birokrasi dan berbagai kebijakan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia dapat membantu menurunkan tuntutan pada pemerintah yang kesulitan dengan masalah kapasitas, dan juga meningkatkan iklim investasi secara keseluruhan.

Akhirnya, dengan mengenali pentingnya pemahaman budaya dan kebutuhan mitra usaha lokal di Indonesia, pemerintah harus fokus pada program yang bisa membina hubungan antara pengusaha Indonesia dan Australia. Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal harus meningkatkan hubungan mereka dengan asosiasi industri dan mengadakan acara yang bisa menghubungkan pihak dari Indonesia dengan pengusaha-pengusaha Australia. Meskipun acara singkat tidak cukup untuk mengembangkan kepercayaan yang diperlukan untuk membentuk dasar kemitraan usaha, tapi hubungan ini setidaknya perlu dimulai. Cara lain untuk membina hubungan dan pengalaman serta pengembangan keterampilan adalah untuk bernegosiasi lebih lanjut terkait kuota Visa Kerja dan Liburan untuk warga Indonesia agar bisa bekerja di Australia. Cara-cara lain, seperti program pertukaran kebudayaan dan bahasa, juga penting untuk dipertimbangkan.

REFERENSI

Allen, Emma R. (2016). *Analysis of Trends and Challenges in the Indonesian Labour Market*. Diambil dari <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/182935/ino-paper-16-2016.pdf>.

Arshad, F. M., Arifin, B., & Tey, Y. S. (2019). Effectiveness of State Trading Enterprises in Achieving Food Security: Case Studies from Bernas in Malaysia and Bulog in Indonesia. Dalam *Makalah Kebijakan* (No. 25; *Makalah Kebijakan*, Edisi November). <https://www.cips-indonesia.org/policy-paper-effectiveness-stes>

Asian Development Bank (ADB). (2020). *Indonesia's Economy to Contract Amid Continuing Disruptions from COVID-19*. Diambil dari <https://www.adb.org/news/indonesia-s-economy-contract-amid-continuing-disruptions-covid-19>.

Asian Development Bank, Bappenas, & International Food Policy Research Institute. (2019). Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045. In *Asian Development Bank* (Edisi Oktober). <https://doi.org/10.22617/TCS190447-2>

Australian Food & Grocery Council. (2020). *Food and Beverage Export Guide to Indonesia* (Edisi September). <https://www.afgc.org.au/member-services/economics-and-trade/indonesia-market>

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2020). *In EoDB, RI will focus in Starting a Business*.

Badan Pusat Statistik. (2020). Impor Daging Sejenis Lembu Menurut Negara Asal Utama, 2010-2019. Diambil dari <https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2011/impor-daging-sejenis-lembu-menurut-negara-asal-utama-2010-2019.html>.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS 2020*. Diambil dari <https://www.bps.go.id/publication/2020/08/28/2aaf3f1339f9295704cb198f/booklet-survei-angkatan-kerja-nasional-februari-2020.html>.

Bank Dunia. (2014). Indonesia: Avoiding the Trap. In *Development Policy Review*.

Bank Dunia. (2020). *Indonesia Economic Prospects, December 2020: Towards a Secure and Fast Recovery*. Diambil dari <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/december-2020-indonesia-economic-prospects>.

Bank Dunia. (2019). *Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class*. Diambil dari <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/aspiring-indonesia-expanding-the-middle-class>.

Bank Dunia. (2019). *Indonesia Skills Development Project*. Diambil dari <https://documents.worldbank.org/curated/en/594741563369992590/pdf/Concept-Stage-Program-Information-Document-PID-Indonesia-Skills-Development-Project-P166693.pdf>Bappenas. (2019). RPJMN. 1-339.

Basri, M. C., & Patunru, A. A. (2012). How to Keep Trade Policy Open: The Case of Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(2), 191–208. <https://doi.org/Doi.10.1080/00074918.2012.694154>

BPHN. (2005). *Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. Diambil dari https://bphn.go.id/data/documents/privatisasi_badan_usaha_milik_negara.pdf.

Dahlan, N. H. M., Isa-Yusuff, Y. M., & Khalid, A. H. M. (2019). Land conflict in Palm oil land procurement in Indonesia: Features, issues and approaches. *International Journal of Supply Chain Management*, 8(1), 971-981.

Dunning, J. H. (1973). The Determinants of International Production. *Oxford Economic Papers*, 25(3), 289–336. <https://www.jstor.org/stable/266>

EY Sweeney. (2016). *The Australia-Indonesia Perceptions Report 2016*. <https://www.aicperceptionsreport.com/>

- Fane, G., & Warr, P. (2008). Agricultural protection in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 44(1), 133–150. <https://doi.org/10.1080/00074910802001611>
- Ghaliya, G., & Gorbiano, M. I. (2020, October). *Fifth version of draft jobs law emerges, this one at 1,187 pages - National - The Jakarta Post*. The Jakarta Post.
- Giri, V. N. (2006). Culture and communication style. *The Review of Communication*, 6(1-2), 124-130.
- Grup Bank Dunia. (2020). *Doing Business 2020: Indonesia. Doing Business 2020, Economy Profile Indonesia*, 1–127.
- Helpman, E., Melitz, M. J., & Yeaple, S. R. (2004). Export versus FDI with heterogeneous firms. *American Economic Review*, 94(1), 300–316. <https://doi.org/10.1257/000282804322970814>
- Innovasjon Norge. (2017). *Handbook of Challenges of Doing Business in Indonesia*. Diambil dari <https://www.innovasjon norge.no/globalassets/sats-internasjonalt/kontorer/indonesia/2017.10.25-final-report---challenges-of-doing-business-in-indonesia.pdf>.
- Januarti, I., Faisal., & Situmorang, R. J. (2019). Investigating the Determinants of Partnership and Community Development Programs: Indonesia Perspective. *Cogent Business & Management*, 6, <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1682764>.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara. (2021). *Dua BUMN Perikanan Jika Rencana Lakukan Merger*. Diambil dari <https://bumn.go.id/index.php/media/news/dua-bumn-perikanan-jika-rencana-lakukan-merger>
- Kementerian Pertanian. (2018). Outlook Susu: Komoditas Pertanian Subsektor Peternakan. <http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/epublikasi/outlook/2018/Outlook%20Susu%202018/files/assets/basic-html/page25.html>.
- Khatri, Y., & Ikhsan, M. (2020). *Enhancing the Development Contribution of Indonesia's State-Owned Enterprises*. Diambil dari <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/618761/reforms-opportunities-challenges-state-owned-enterprises.pdf>
- Kim, K. (2019). Using partially state-owned enterprises for development in Indonesia. *Asia Pacific Business Review*, 25(3), 317–337. <https://doi.org/10.1080/13602381.2019.1575660>
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2020). *Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penyelesaian Konflik Agraria Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria ke Depan*.
- Krishnamurti, Indra, Muhammad Diheim Biru. (2019). *Expanding Hybrid Rice Production in Indonesia*. Center for Indonesian Policy Studies
- Lipsey, R. E., & Sjöholm, F. (2005). The impact of inward FDI on host countries: why such different answers? In *Does Foreign Direct Investment Promote Development*. http://www.iie.com/publications/chapters_preview/3810/02iie3810.pdf
- Lipsey, R. E., & Sjöholm, F. (2011). Foreign direct investment and growth in East Asia: Lessons for Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 47(1), 35–63. <https://doi.org/10.1080/00074918.2011.556055>
- Lowy Institute. (2019). *Lowy Institute Poll 2019*. <https://lowyinstitutepoll.lowyinstitute.org/themes/indonesia/#section-indonesia>
- Manpowergroup. (2018). *Solving the Talent Shortage: Build, Buy, Borrow, Bridge*. Diambil dari [https://go.manpowergroup.com/hubfs/TalentShortage%202018%20\(Global\)%20Assets/PDFs/MG_TalentShortage2018_lo%206_25_18_FINAL.pdf](https://go.manpowergroup.com/hubfs/TalentShortage%202018%20(Global)%20Assets/PDFs/MG_TalentShortage2018_lo%206_25_18_FINAL.pdf).
- Marks, S. V., & Rahardja, S. (2012). Effective rates of protection revisited for Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48:1, 57–84.
- Marks, S. V., & Rahardja, S. (2012). Effective rates of protection revisited for Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48:1, 57–84.

Mulyani, A., Kuncoro, D., Nursyamsi, D., Agus, F., Besar, B., Sumberdaya, L., Pertanian, L., Tentara Pelajar, J., 12 Bogor, N., & Barat, J. (2016). Analisis Konversi Lahan Sawah: Penggunaan Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi yang Mengkhawatirkan. *Jurnal Tanah Dan Iklim*, 40(2), 121–133.

Munadi, E. (2019). Indonesian non-tariff measures: Updates and insights. In *Non-Tariff Measures in ASEAN-An Update* (Edisi Agustus, hlm. 67–84).

Nambiar, D., Karki, S., Rahardiani, D., Putri, M., & Singh, K. (2019). Study on Skills for Future Indonesia. Diambil dari <https://www.unicef.org/indonesia/media/6221/file/Study%20on%20skills%20for%20the%20future%20in%20Indonesia.pdf>.

Panggabean, H. (2004). Characteristics of Indonesian intercultural sensitivity in multicultural and international work groups. In B. N. Setiadi, A. Supratiknya, W. J. Lonner, & Y. H. Poortinga

Prakarsa, O. and. (2016). *Mapping Policies and Stakeholders of Foreign Direct Investments in Indonesian Agriculture Sector*. 84.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, (2016).

Productivity Commission. (2020). *Foreign Investment in Australia* (Makalah penelitian Productivity Commission, Edisi Juni).

PwC. (2016). Indonesian Infrastructure: Stable Foundations for Growth. Diambil dari <https://www.pwc.com/id/en/capital-projects-infrastructure/capital-project-service/indonesian-infrastructure-stable-foundations-for-growth.pdf>.

Ramstetter, E. D. (1999). Trade propensities and foreign ownership shares in Indonesian manufacturing. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 35(2), 43–66. <https://doi.org/10.1080/00074919912331337587>

Reilly, A. (2015). Low-cost labour or cultural exchange? Reforming the Working Holiday visa programme. *The Economic and Labour Relations Review*, 26(3), 474–489. doi:10.1177/1035304615598160.

Rondhi, M., Pratiwi, P. A., Handini, V. T., Sunartomo, A. F., & Budiman, S. A. (2018). Agricultural land conversion, land economic value, and sustainable agriculture: A case study in East Java, Indonesia. *Land*, 7(4). <https://doi.org/10.3390/land7040148>

Ruslan, K. (2019). Memperbaiki Data Pangan Indonesia Lewat Metode Kerangka Sampel Area. *Center for Indonesian Policy Studies*, 7.

Rutten, R., Bakker, L., Alano, M. L., Salerno, T., Savitri, L. A., & Shohibuddin, M. (2017). Smallholder bargaining power in large-scale land deals: a relational perspective. *Journal of Peasant Studies*, 44(4), 726–752. <https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1277991>

Sekretariat Presiden. (2021). Presiden Jokowi Cabut Lampiran Perpres Terkait Miras. Diambil dari <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-cabut-lampiran-perpres-terkait-miras/>.

Tempo. (2021). *Bos Baru BNI Beri Bocoran BUMN Pangan yang Bakal Dilebur*. Diambil dari <https://bisnis.tempo.co/read/1408147/bos-baru-rni-beri-bocoran-bumn-pangan-yang-bakal-dilebur>.

Tong, D., & Waltermann, B. (2013). *Growing Pains, Lasting Advantage: Tackling Indonesia's Talent Challenges*. Diambil dari <https://www.bcg.com/publications/2013/people-organization-leadership-talent-tackling-indonesias-talent-challenges-growing-pains-lasting-advantage>.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). *World Population Prospects 2019: Highlights*. Diambil dari https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

Wawancara

Wawancara 1 – Peter Fennel, Ketua International New Business Advisory (2020, 10 November). Komunikasi pribadi.

Wawancara 2 – Michael Coote, Manajer – Export Development of AUSVEG (2020, 13 November). Komunikasi pribadi.

Wawancara 3 – Michael Rogers, Direktur Utama The Australian Fresh Produce Alliance (2020, 13 November). Komunikasi pribadi.

Wawancara 4 – Garry Embleton, Direktur Utama Ausfine Food International (2020, 18 November). Komunikasi pribadi.

Wawancara 5 – Seorang eksekutif di sebuah perusahaan pengimpor makanan di Indonesia (2020, 22 November). Komunikasi pribadi.

Wawancara 6 – Richard Slaney, Manajer Umum Farms Indonesia (2020, 11 Desember). Komunikasi pribadi.

Wawancara 7 – Valeska Valeska, Manajer Wilayah Indonesia di Meat & Livestock Australia (2021, 8 Januari). Komunikasi pribadi.

Wawancara 8 – Greg Pankhurst, Kepala Asosiasi Eksportir Ternak Hidup Queensland atau Queensland Livestock Exporters Association (2021, 19 Januari). Komunikasi pribadi.

Wawancara 9 – Daniel McNicol, Direktur Utama Agricom Group (2021, 20 Januari). Komunikasi pribadi.

Wawancara 10 – Geoffrey Annison, Eksekutif Kepala Deputi di Australian Food and Grocery Council (2021, 5 Februari). Komunikasi pribadi.

Wawancara 11 – Henry Rombe, Direktur Indonesia Investment Promotion Centre Sydney (2021, 17 Februari). Komunikasi pribadi.

TENTANG PENULIS

Donny Pasaribu memegang gelar doktoral di bidang Ekonomi dan gelar pascasarjana di bidang Perdagangan Internasional dan Hubungan Ekonomi dari Australian National University, Australia. Minat penelitiannya meliputi bidang ekonomi pembangunan, perdagangan internasional, ekonomi sumber daya alam, kebijakan publik, dan kebijakan persaingan. Sebelumnya, ia merupakan peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia.

Arumdriya Murwani adalah Peneliti Muda di CIPS dengan spesialisasi ketahanan pangan dan perdagangan internasional. Sebelum bergabung dengan CIPS, Arum merupakan bagian dari tim riset Universitas Gadjah Mada yang mengkaji sisi ekonomi politik dari transisi menjadi energi terbarukan di Indonesia serta kerjasama pembangunan di negara-negara Selatan. Arumdriya mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia adalah salah satu alumni CIPS Emerging Policy Leaders Program (EPLP) 2020. .

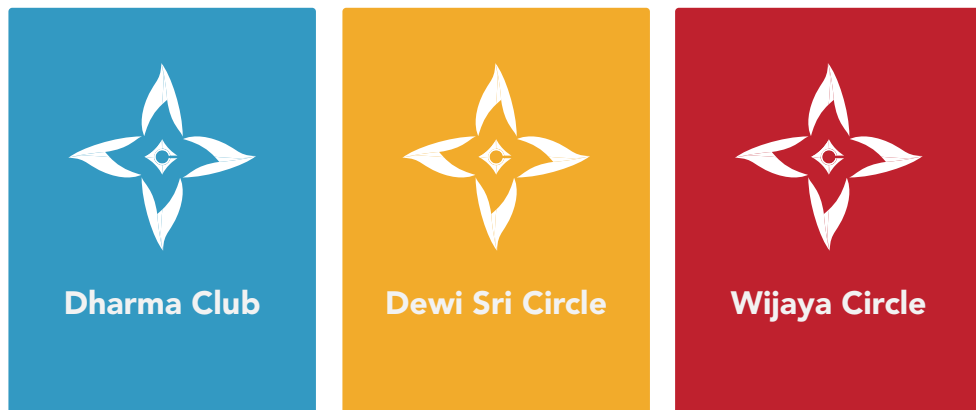
Indra Setiawan adalah Peneliti Muda di CIPS dengan spesialisasi pada isu pertanian serta ekonomi digital. Sebelumnya, Indra bekerja di sebuah perusahaan konsultan sebagai Analis Riset di bidang perkembangan infrastruktur serta kebijakan energi dan sumber daya alam. Indra merupakan lulusan Universitas Diponegoro jurusan Hubungan Internasional dan merupakan alumni CIPS Emerging Policy Leaders Program (EPLP) 2020.

AYO BERGABUNG DALAM PROGRAM “SUPPORTERS CIRCLES” KAMI

Melalui *Supporters Circles*, kamu, bersama dengan ratusan lainnya, membantu kami untuk melakukan penelitian kebijakan serta advokasi untuk kemakmuran jutaan orang di Indonesia yang lebih baik.

Dengan bergabung dalam *Supporters Circles*, *supporters* akan mendapatkan keuntungan dengan terlibat lebih dalam di beberapa karya CIPS. *Supporters* bisa mendapatkan:

- Undangan Tahunan *Gala Dinner* CIPS
- Pertemuan eksklusif dengan pimpinan CIPS
- Mendapatkan prioritas pada acara-acara yang diadakan oleh CIPS
- Mendapatkan informasi terbaru secara personal, setiap satu bulan atau empat bulan, lewat email dan video mengenai CIPS
- Mendapatkan *hard-copy* materi publikasi CIPS (lewat permintaan)



Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi anthea.haryoko@cips-indonesia.org.



Pindai untuk bergabung

TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.

FOKUS AREA CIPS:


Ketahanan Pangan dan Agrikultur: Memberikan akses terhadap konsumen di Indonesia yang berpenghasilan rendah terhadap bahan makanan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan berkualitas. CIPS mengadvokasi kebijakan yang menghapuskan hambatan bagi sektor swasta untuk beroperasi secara terbuka di sektor pangan dan pertanian.


Kebijakan Pendidikan: Masa depan SDM Indonesia perlu dipersiapkan dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan abad ke-21. CIPS mengadvokasi kebijakan yang mendorong sifat kompetitif yang sehat di antara penyedia sarana pendidikan. Kompetisi akan mendorong penyedia sarana untuk terus berupaya berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan terhadap anak-anak dan orang tua yang mereka layani. Secara khusus, CIPS berfokus pada peningkatan keberlanjutan operasional dan keuangan sekolah swasta berbiaya rendah yang secara langsung melayani kalangan berpenghasilan rendah.


Kesejahteraan Masyarakat: CIPS mempercayai bahwa komunitas yang solid akan menyediakan lingkungan yang baik serta mendidik bagi individu dan keluarga mereka sendiri. Kemudian, mereka juga harus memiliki kapasitas untuk memiliki dan mengelola sumber daya lokal dengan baik, berikutan dengan pengetahuan mengenai kondisi kehidupan yang sehat, agar mereka bisa mengelola pembangunan dan kesejahteraan komunitas dengan baik.


www.cips-indonesia.org

 facebook.com/cips.indonesia

 [@cips_id](https://twitter.com/cips_id)

 [@cips_id](https://www.instagram.com/cips_id)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.linkedin.com/company/center-for-indonesian-policy-studies)

 [Center for Indonesian Policy Studies](https://www.youtube.com/channel/UCj8t5G8p4p4p4p4p4p4p4p4p4)

Jalan Terogong Raya No. 6B
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Indonesia